98-838678

Sekilas PARTAI KEADILAN

Diterbitkan oleh: Sekretariat DPP Partai Keadilan

Sekilas Partai Keadilan

Sekilas Partai Keadilan

Piagam Deklarasi • Manifesto Politik • Jati Diri Partai Keadilan • Anggaran Dasar • Anggaran Rumah Tangga
• Agenda Nasional • Seruan Untuk Anggota dan Simpatisan Partai • Susunan Pengurus • Pidato Politik Presiden • Biodata Presiden • Tafsir Lambang Partai Keadilan

LIBRARY OF CONGRESS
JAN 06 1999
PURCHASE
JAKARTA

JQ719
.P36
1998
Copy 1
ASIAN
INDO

SEKILAS PARTAI KEADILAN

Sampul: Deklarasi Partai Keadilan di Masjid Agung Al Azhar, 9 Agustus 1998
(Dokumentasi DPP Partai Keadilan)

Diterbitkan Oleh: Sekretariat DPP Partai Keadilan
Jl. Mampang Prapatan Raya No 98 D-E-F
Jakarta Selatan (12720),
Telp. (62-21) 79194181, 79194182, 79194183, 7995425
Fax. (62-21) 7995433
Website: http://www.keadilan.or.id
E-mail: partai@keadilan.or.id

Copyright © 1998 DPP Partai Keadilan
Cetakan Pertama, Desember 1998

Daftar Isi

Kata Pengantar viii
Kata Sambutan x

Piagam Deklarasi Partai Keadilan 1
Manifesto Politik Partai Keadilan 5
Jati Diri Partai Keadilan 15
A. PENDAHULUAN 15
B. LATAR BELAKANG SEJARAH 16
C. LANDASAN FILOSOFIS 19
D. PEMILIHAN NAMA 25
E. KARAKTERISTIK 27
1. Moralis 27
2. Profesional 31
3. Patriotik 32
4. Moderat 33
5. Demokrat 34
6. Reformis 36
7. Independen 37
F. PRINSIP DASAR 39
1. Keadilan, Persamaan dan Keseimbangan 40
2. Kesatuan Nasional 42
3. Kemajuan 42
4. Khidmatul Ummah demi Persatuan 44
5. Kerjasama Internasional 46
G. VISI DAN MISI 46

Anggaran Dasar Partai Keadilan 51
Muqaddimah 51
Bab Satu, Nama, Asas, Kedudukan Dan Lambang 52
Bab Dua, Tujuan 52
Bab Tiga, Keanggotaan 53
Bab Empat, Struktur Organisasi 53
Bab Lima, Majelis Syuro 53
Bab Enam, Majelis Pertimbangan Partai 54
Bab Tujuh, Dewan Pimpinan Pusat 54
Bab Delapan, Dewan Pimpinan Wilayah 55
Bab Sembilan, Dewan Syari'ah 55

Bab Sepuluh, Hubungan Antar Struktur 56
Bab Sebelas, Keuangan 56
Bab Duabelas, Peraturan Umum Dan Konversi 56
Bab Tigabelas, Aturan Penutup 57

Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan 59
Bab Satu, Sasaran Dan Sarana 59
Bab Dua, Keanggotaan 64
Bab Tiga, Musyawarah Nasional 67
Bab Empat, Majelis Syuro 70
Bab Lima, Majelis Pertimbangan Partai 72
Bab Enam, Dewan Pimpinan Pusat 73
Bab Tujuh, Dewan Syari'ah 75
Bab Delapan, Struktur Organisasi Wilayah 77
Bab Sembilan, Musyawarah Wilayah 77
Bab Sepuluh, Majelis Pertimbangan Wilayah 78
Bab Sebelas, Dewan Pimpinan Wilayah 80
Bab Duabelas, Struktur Organisasi Daerah 82
Bab Tigabelas, Musyawarah Daerah 82
Bab Empatbelas, Dewan Pimpinan Daerah 83
Bab Limabelas, Struktur Organisasi Cabang 84
Bab Enambelas, Musyawarah Cabang 85
Bab Tujuhbelas, Dewan Pimpinan Cabang 86
Bab Delapanbelas, Struktur Organisasi Ranting 87
Bab Sembilanbelas, Musyawarah Ranting 87
Bab Duapuluh, Dewan Pimpinan Ranting 89
Bab Duapuluhsatu, Keuangan 90
Bab Duapuluhdua, Hubungan Antar Struktur 90
Bab Duapuluhtiga, Ketentuan Tambahan 91

Agenda Nasional Partai Keadilan 93
A. UMUM 93
B. EKONOMI 94
C. POLITIK 95
D. HUKUM 96
E. PENDIDIKAN 96
F. ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 97
G. LINGKUNGAN HIDUP 98
H. PEMERINTAHAN DAERAH 98
I. KEPEMUDAAN 99
J. SENI BUDAYA 99
K. PENERANGAN 100
L. KEWANITAAN 100
M. KESEHATAN 100
N. SOSIAL 101

Seruan Untuk Anggota dan Simpatisan Partai 103
Pidato Politik Presiden Partai Keadilan Pada Peresmian
DPW DI Yogyakarta 107
DPW Jawa Tengah 113
DPW Jawa Timur 119
DPW Lampung 125
DPW DKI Jakarta 133
DPW Sumatra Utara 139

Susunan Pengurus DPP 145
Susunan Pengurus DPW 149
Tafsir Lambang Partai Keadilan 155
Biodata Presiden Partai Keadilan 157

Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahiim

Seperti namanya, partai ini mencerminkan sebuah substansi kehidupan yang paling dibutuhkan oleh bangsa Indonesia di saat kelahirannya; keadilan. Kami selalu mengatakan bahwa Partai Keadilan adalah kuncup reformasi yang mekar jadi bunga. Ia lahir di atas puing-puing sebuah rezim yang baru saja runtuh. Ia ditakdirkan lahir di tengah krisis dan tumbuh berkembang pada titik nadir sebuah masa transisi.

Dalam setiap krisis, setiap bangsa biasanya akan segera menengok kepada anak-anaknya yang tengah berpikir tentang masa depan. Karena anak-anak seperti itulah yang selalu mewakili harapan-harapannya. Krisis yang melanda sebuah bangsa, sepanjang sejarah, selalu lahir di saat pikiran-pikiran lama yang membentuk kehidupan bangsa itu sebelumnya mulai mati. Bangkai pikiran itulah sesungguhnya yang mematikan elemen lain dari bangsa tersebut. Dan apa yang paling dibutuhkan oleh bangsa itu, dengan begitu, adalah pikiran-pikiran, teori-teori sosial, dan disain-disain baru tentang negara. Dari situlah "harapan akan perubahan-perubahan besar" memperoleh kekuatannya.

Partai politik bukanlah merupakan pengecualian. Jauh sebelum sebuah partai dipersepsi sebagai sebuah entitas politik yang ditandai dengan organisasi, struktur dan massanya, sebuah partai haruslah merupakan struktur lengkap dari sebuah gagasan besar. Usia sebuah partai akan sangat ditentukan oleh daya tahan gagasan-gagasannya terhadap berbagai perubahan pada skala ruang dan waktu.

Partai Keadilan bukanlah merupakan pengecualian dari kaidah itu. Kepercayaan itulah setidaknya yang mendorong kami membukukan dokumen-dokumen ini. Apa yang dijelaskan oleh dokumen-dokumen ini adalah kerangka-kerangka pikiran yang mengarahkan cara kami bekerja untuk bangsa ini. Kami tidak terlalu

terobsesi untuk memperkenalkan nama kami lebih dari obsesi kami untuk memperkenalkan gagasan dan cara kerja kami. Inilah cara kami memahami, dan beginilah kami ingin dipahami.

Buku ini merupakan kumpulan dokumen resmi Partai Keadilan yang pertama. Kami berharap buku ini memerankan fungsi mediasi antara partai dengan para kader, pendukung dan massa, antara sesama partai politik lainnya, antara partai dan pemerintah, serta antara partai dengan bangsa ini secara keseluruhan. Silakan memberi komentar apa saja tentang buku ini. Karena partai ini percaya pada prinsip "perbaikan berkesinambungan".

"Berlaku adillah, karena itu lebih dekat kepada takwa."

Jakarta, 26 Nopember 1998

H. M. Anis Matta
Sekretaris Jendral

Kata Sambutan

Segala puji hanya bagi Allah, dengan pujian yang banyak. Shalawat serta salam semoga terlimpah atas Nabi akhir zaman, pemimpin umat manusia, Rasulullah Muhammad saw.

Islam adalah agama yang ajarannya bersifat komprehensif dan integral. Di dalamnya memuat seperangkat aturan yang menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia. Tidak saja mengenai ritus peribadatan, tetapi juga bidang-bidang kehidupan yang berdimensi duniawi seperti: masalah sosial, politik, ekonomi, pendidikan, hukum, seni budaya, dan sebagainya.

Nabi Muhammad saw. diutus oleh Allah dengan membawa wahyu. Dengannya Islam meraih kejayaan dan menebarkan rahmat ke segenap penjuru dunia. Sepeninggal Nabi saw. misi risalah ini diteruskan oleh para sahabat, kemudian oleh generasi sesudahnya, dan demikian seterusnya hingga kepada kita sekarang ini.

Setiap perjuangan untuk meraih cita-cita luhur, tidak akan sepi dari hambatan, tantangan, dan permusuhan. Itu pula yang dialami oleh umat ini sepanjang sejarah. Yang demikian adalah sunnatullah yang tidak mungkin dihindari. Ketepatan antisipasi bagi setiap problem yang datang –dimana tidak sama watak problem antara suatu masa dengan masa yang lain– akan sangat menentukan keberhasilan perjuangan ini.

Bangsa Indonesia saat ini tengah menghadapi problema krisis legitimasi politik. Umat Islam di berbagai belahan dunia –tidak terkecuali Indonesia– belum mempunyai wadah formal yang cukup representatif untuk menyuarakan aspirasi mereka dan inspirasi ajaran agamanya.

Untuk itu upaya perjuangan menuju ke sana adalah suatu keniscayaan dan mendesak untuk dilakukan. Banyak cara bisa

ditempuh, beragam sarana bisa dipergunakan. Dengan satu syarat, semua itu tidak menyalahi apa yang telah digariskan oleh ajaran Islam dan tidak melanggar rambu-rambunya.

Kelahiran Partai Keadilan –bersama institusi sejenis yang lahir sebelum maupun sesudahnya– merupakan sebentuk upaya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di lapangan politik. Karena di situlah (di dalam lembaga pemerintahan) diambil segala kebijakan strategis untuk mengatur masyarakat. Akses menuju ke sana adalah akses menuju penegakan kebenaran dan keadilan di tengah masyarakat.

Sebagai sebuah institusi politik, kami memang baru lahir. Tetapi sebagai da'i penyeru kebenaran, seluruh sumber daya manusia yang tergabung dalam pengurus maupun kader partai ini adalah orang-orang yang sudah demikian lama memiliki perhatian besar pada berbagai masalah kehidupan masyarakat.

Untuk sempurnanya perkenalan Partai Keadilan di hadapan masyarakat luas, kami merasa perlu mempublikasikan berbagai hal terkait dengan partai, dan buku ini adalah salah satunya.

Isi buku ini meliputi kerangka pemikiran yang menjadi landasan gerak partai ini, serta informasi singkat mengenai seluk-beluk Partai Keadilan. Semoga kehadiran buku ini ke tengah khalayak, mampu menjembatani kesenjangan informasi tentang Partai Keadilan dan memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya.

Akhirnya, dukungan dan doa restu semua pihak sangat kami harapkan untuk membersamai derap perjuangan ini. Kepada pihak-pihak yang membantu penerbitan dan penyebaran buku ini, semoga Allah membalas amal baiknya dengan balasan yang berlipat. Amin ya rabbal 'alamin.

Jakarta, 26 Nopember 1998

Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il, MSc
Presiden Partai Keadilan

PARTAI KEADILAN

Piagam Deklarasi Partai Keadilan

Bahwa sesungguhnya Bangsa Indonesia telah melintasi gelombang pasang surut, menghela beban berat penjajahan, penindasan dan pengkhianatan. Tahap demi tahap perjuangan panjang mengantarkan bangsa ini ke gerbang kemerdekaan dan kedaulatan, yang pada mulanya dicitakan untuk mewujudkan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, sesuai dengan semangat Proklamasi 1945. Namun selama lima dekade berikutnya, garis

sejarah itu mengalami berbagai penyimpangan, sehingga cita-cita besar bangsa menjadi kabur.

Kejatuhan rejim Orde Lama, diikuti dengan keruntuhan rejim Orde Baru, merupakan tragedi yang seharusnya menyadarkan kembali bangsa ini akan cita-cita luhurnya semula. Seluruh kekuatan bangsa wajib bergandeng tangan dengan landasan persaudaraan, keadilan, dan berpacu dalam kebaikan, seraya meninggalkan permusuhan, kezhaliman, dan pertikaian antar kelompok.

Gerakan mahasiswa, yang disokong penuh rakyat Indonesia, telah mengobarkan "Reformasi Mei 1998" sebagai peretas jalan bagi terbentuknya "Orde Reformasi"; orde yang diikat dengan nilai-nilai fitri kemanusiaan berupa keimanan, moralitas, kemerdekaan, persamaan, kedamaian, dan keadilan. Berkat rahmat Allah SWT, kemudian dipicu semangat reformasi, tercetuslah momentum untuk membangun kembali negeri yang besar ini, dengan cara pandang yang benar dan meninggalkan segala bentuk kesalahan generasi terdahulu. Mari bersatu dalam kebenaran untuk mengisi lembaran sejarah baru agar bangsa Indonesia senantiasa berdiri tegak dan berperan serta dalam mewujudkan masyarakat internasional yang berperadaban.

Kejayaan atau kehancuran suatu negeri merupakan buah dari kepatuhan atau keingkaran penduduknya terhadap nilai-nilai religius dan universal, terutama nilai keadilan. Pada titik ini fitrah insani bertemu dengan tuntutan reformasi dan peluang demokratisasi. Maka perjuangan menegakkan keadilan pun menjadi keharusan, sebagai manifestasi misi utama Islam untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Demi mewujudkan cita-cita sejati Proklamasi, mengisi kemerdekaan, mempertahankan kedaulatan dan persatuan, serta berbekal semangat reformasi dan dukungan umat dari berbagai daerah, kami selaku anak bangsa dengan ini mendeklarasikan berdirinya **PARTAI KEADILAN**.

Semoga Allah Yang Maha Kuasa membimbing dan memberi kekuatan untuk menegakkan keadilan, mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh bangsa Indonesia.

"..... Berbuat adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa ....." (*Al-Qur-an, Surah Al-Maidah : 8*)

Dinyatakan di Jakarta
Ahad, 15 Rabi'ul Tsani 1419/ 9 Agustus 1998

Dewan Pendiri
PARTAI KEADILAN

Dr. H. M. Hidayat Nurwahid, MA	H. Luthfi Hasan Ishaaq, MA
Ketua	Sekretaris

Anggota – Anggota :

1. Dr. H. Salim Segaf Aljufri, MA
2. Dr. Mulyanto, MEng
3. Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il, MSc
4. Drs. H. Abu Ridho, A.S.
5. H. Mutammimul Ula, SH
6. KH. Abdul Hasib, Lc
7. Fahri Hamzah, SE
8. Dr. H. Daud Rasyid Sitorus, MA
9. Drs. H. Mukhlis Abdi
10. Dr. Agus Nurhadi
11. Igo Ilham, Ak
12. Chin Kun Min (al-Hafizh)
13. Drs. Arifinto
14. Nursanita Nasution, SE, MS
15. H. Rahmat Abdullah
16. Dr. H. Ahmad Satori Ismail
17. Ir. H. Untung Wahono
18. Mashadi
19. H. Maddu Mallu, SE, MBA
20. H. M. Nasir Zein, MA
21. K.H. Acep Abdus Syakur
22. Dr. H. Ahzami Samiun Jazuli, MA

23. KH. Yusuf Supendi, Lc
24. Hj. Yoyoh Yusroh
25. H. M. Anis Matta, Lc
26. Dra. Zirlirosa Jamil
27. Drs. H. Suharna S., MT
28. H. M. Ihsan Arlansyah Tanjung
29. Syamsul Balda, SE, MM
30. H. Habib Aboe Bakar Al-Habsyi
31. Sunmanjaya Rukmandis
32. Ahmad Heriawan, Lc
33. Drs. Erlangga Masdiana, MSi
34. Didik Akhmadi, Ak, MCom
35. Ir. H. Suswono
36. Ahmad Zainuddin, Lc
37. K.H. Abdur Roqib, Lc
38. H. Abdullah Said Baharmus, Lc
39. H. Ahmad Hatta, MA, PhD
40. H. Makmur Hasanuddin, MA
41. Dra. Hj. Siti Zainab
42. Dra. Sri Utami
43. Nurmansyah Lubis, SE, Ak, MM
44. dr. H. Naharus Surur
45. Drs. Muhroni
46. H. Aus Hidayat
47. Ir. H. Tifatul Sembiring
48. Drs. Almuzammil Yusuf
49. H. M. Tizar Zein
50. H. Fahmy Alaydrus, Psy

❖❖❖

Manifesto Politik Partai Keadilan

Segala puji bagi Allah SWT, Pencipta petala langit, bumi dan segenap makhluk yang ada di dalamnya. Allah yang memerintahkan manusia supaya menegakkan keadilan. "Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (Keadilan) supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu." Shalawat dan salam atas imam para nabi dan rasul, Muhammad SAW, yang diutus sebagai "Rahmatan lil 'Alamin", shalawat dan salam atas keluarga, shahabat dan orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat.

Kehadiran manusia di muka bumi memiliki tujuan dan misi tersendiri. Tujuan eksistensialnya, mengagungkan Allah Pencipta langit dan bumi serta segenap makhluk yang ada di dalamnya. Sementara misi otentiknya, memakmurkan bumi dan membangun peradaban. Kesamaan tujuan dan misi otentik menegaskan tentang kesatuan manusia. Manusia diciptakan dari asal yang satu dan karena itu posisinya sebagai makhluk Allah adalah sama. Ketinggian martabat diperoleh karena ketundukannya kepada kehendak suci dan hukum abadi. Pengesaan (tauhid) atas kerububiyahan dan keuluhiyahan Allah yang mutlak, yang telah dikukuhkan dalam deklarasi kemanusiaan paling universal merupakan penyerahan diri yang total kepada-Nya. Untuk itu manusia dianugerahi potensi diri yang lengkap, fasilitas alam, dan kebebasan untuk memilih secara bertanggung jawab.

Sejarah kontemporer umat manusia dipenuhi dengan konflik yang berkepanjangan. Krisis demi krisis terus menghantui kehidupannya. Bangsa Indonesia sebagai anggota masyarakat dunia menghadapi tantangan yang sama. Selama berabad-abad, bangsa yang besar ini bagai buih yang dihempaskan gelombang ke segala arah, tanpa peran politik yang berarti.

Umat Islam sebagai warga mayoritas di Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tanggung jawab utama untuk mengubah posisi Indonesia menjadi bangsa yang berwibawa dalam pergaulan antarbangsa. Hal itu hanya bisa dilakukan, jika umat melakukan rekonstruksi peradaban secara mendasar. Umat bersama seluruh kekuatan bangsa seyogyanya mencanangkan prioritas agenda perubahan peradaban.

Sebenarnya di awal abad ke-20, bangsa Indonesia telah memberikan kontribusi bagi peradaban dunia. Perjuangan melawan penjajahan terbukti menggelorakan api kemerdekaan nasional di seantero kawasan Dunia Ketiga, yang kemudian membentuk ikatan negara-negara non-blok. Namun fajar kebangkitan itu hanyalah "fajar kadzib", harapan semu. Setengah abad setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia kembali terpuruk di pojok sejarah dunia.

Patut dibuka kembali catatan sejarah pada tahun 1905, ketika lahir Serikat Dagang Islam (SDI) sebagai organisasi politik

pertama yang bercorak nasional, yang kemudian pada tahun 1911 menjadi Sarikat Islam. Lalu 1928, tercetusnya Sumpah Pemuda yang menandai kemunculan bangsa baru bernama Indonesia sebagai salah satu anak peradaban dunia. Pada 1945, proklamasi kemerdekaan dikumandangkan untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Tragisnya, dari penjajahan eksternal, rakyat Indonesia masuk perangkap penindasan internal. Sampai 1965, runtuhnya rejim Orde Lama dengan jargon "politik sebagai panglima". Akhirnya 1998, runtuh pula rejim Orde Baru setelah pembangunan ekonomi sebagai basis legitimasinya ambruk.

Gerakan mahasiswa yang memelopori "Reformasi Mei 1998" merupakan perintis jalan bagi terwujudnya "Orde Reformasi", orde keterbukaan dalam segala bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan landasan nilai-nilai universal : keimanan, moralitas, kemerdekaan, kesetaraan, kedamaian, dan keadilan bagi semua orang. Apakah perjuangan menegakkan Orde Reformasi akan menjadi "fajar kadzib" yang lain, atau justeru terbuka kemungkinan merekahnya "fajar shadiq" – harapan sejati bagi perbaikan masyarakat dan negara. Untuk menjamin terwujudnya harapan itu, maka digalanglah kekuatan politik bernama "Partai Keadilan".

Partai yang didirikan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 1998 ini memiliki akar historis dan ideologis yang panjang. Para eksponen pendukungnya merupakan generasi yang terlibat aktif dalam perjuangan merebut kemerdekaan nasional. Sementara kaum muda yang tergabung dalam partai ini menjadi unsur yang sangat menentukan dalam dinamika gerakan mahasiswa dan pemuda reformis. Mereka adalah bagian dari "Angkatan 1998" yang mewarisi amanah sejarah generasi terdahulu.

Bangsa Indonesia patut bersyukur kepada Allah, sampai sejauh ini mampu melewati begitu banyak krisis dalam sejarah. Hal itu terutama karena anak-anak bangsa yang mendiami wilayah kepulauan yang amat luas — terdiri dari beragam agama, suku, dan bahasa — ini selalu menemukan sandaran pada kekuatan persatuan (nasionalitas) dan kekuatan keyakinan (religiusitas). Nasionalisme relijius itulah yang menjaga negeri Nusantara dari kehancuran dan perpecahan.

Renungan mendalam atas sejarah bangsa mengungkapkan bahwa akar krisis sesungguhnya ada di dalam diri manusia dan nilai-nilai yang berkembang dalam jaringan sosialnya. Kata kunci yang menghubungkan keduanya adalah tirani dan kezhaliman. Masyarakat terpolarisasi menjadi kelompok kuat yang menjadi pelaku tirani dan kelompok lemah yang menjadi obyek kezhaliman. Tirani dan kezhaliman menghancurkan martabat manusia, merampas hak-hak asasinya, mematikan semua potensi kreatifnya, merusak jaringan sosialnya dan akhirnya menciptakan stagnasi dan menutup peluang bangsa untuk menjadi besar dan kuat.

Menegakkan keadilan merupakan jalan menuju masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik. Sebab, keadilan adalah sunnah kauniyah yang telah menjadi ciri alamiah segala sesuatu. Di atas prinsip keadilan inilah Allah menciptakan langit dan bumi. Wujud keadilan tampak pada tindakan seseorang yang meletakkan sesuatu pada tempatnya tanpa melampaui batas. Sebab, tindakan melampaui batas adalah bentuk ketidakadilan (kezhaliman) yang paling umum.

Keadilan membuka jalan bagi nilai-nilai kebenaran, kebaikan dan keindahan dan kebahagiaan hidup. Keadilan bukan hanya menyediakan ruang bagi setiap orang untuk mendapatkan hak-hak asasinya sebagai manusia, tetapi mewadahi semua potensi inovasi dan kreativitasnya. Keadilan menebarkan rasa aman, dan membebaskan manusia dari semua bentuk intimidasi dan rasa takut. Keadilan menjamin distribusi kekayaan negara secara proporsional, memberi peluang bekerja dan berusaha secara merata. Keadilan menjadikan hukum berada di atas penguasa dan rakyat. Keadilan menjamin bekerjanya mekanisme kontrol sosial secara efektif.

Keadilan membebaskan, sedang kezhaliman membelenggu. Keadilan itu cahaya, dan kezhaliman itu kegelapan.

Dihadapkan pada pilihan dialektis antara tatanan yang adil dan yang tidak adil, manusia secara individu ataupun kolektif memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak sesuatu, dengan konsekuensi menanggung resiko sendiri. Sebab yang benar telah nyata bedanya dengan yang batil, petunjuk telah nyata

berseberangan dengan kesesatan. Manusia diberi alat persepsi yang sempurna untuk membedakan setiap perkara dan menentukan pilihannya, bebas dari segala bentuk tirani. Kebebasan merupakan fitrah yang tertanam pada diri manusia. Kehidupan yang utuh berpangkal dari kebebasan ini. Manusia harus bebas dari bentuk tirani yang memasung kebebasan. Oleh sebab itu, segala bentuk tirani yang memasung kebebasan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Setiap warga negara harus memahami hak dan kewajibannya serta menyadari wewenang dan kewajiban pemerintahnya. Dalam keadaan pemerintahan lalai menerapkan hukum, maka masyarakat berkewajiban melakukan "hisbah" (kontrol sosial). Fungsi kontrol akan berjalan efektif manakala warga memiliki keberdayaan politis. Di sini terlihat betapa pentingnya pendidikan politik bagi setiap warga. Dengan demikian, pembangunan masyarakat yang secara politis berdaya dan mampu melahirkan keseimbangan kekuasaan untuk mewujudkan rahmat bagi kehidupan merupakan cita-cita perjuangan partai.

Cita-cita itu bersifat universal dan sejalan dengan sistem politik berlandaskan keadilan, yang antara lain bercirikan : kedaulatan kepemimpinan berada di tangan rakyat, menghargai kebebasan dan persamaan, memandang upaya melawan kezhaliman sebagai kewajiban setiap warga negara, dan menghormati konstitusi. Apabila masyarakat benar-benar berpegang pada norma keadilan, maka mereka tentu berperan sebagai entitas yang menghidupkan budaya "musyarakah" (partisipasi politik). Partisipasi warga terhadap persoalan-persoalan bangsa adalah cermin budaya orisinal, patriotik dan religius.

Tanpa keberdayaan warga mustahil fungsi kontrol dapat terlaksana. Keberdayaan masyarakat dalam melaksanakan seluruh hak dan kewajibannya merupakan inti "masyarakat madani". Warga yang sadar akan mampu mencegah kesewenang-wenangan elit yang mendominasi proses pembuatan kebijakan publik. Partai memandang perlu pembentukan masyarakat madani — sebuah masyarakat yang memegang teguh ideologi yang benar, berakhlaq mulia, dan secara politik-ekonomi-budaya bersifat mandiri, dan memiliki pemerintahan sipil.

Pemerintahan sipil wajib menghormati hukum dan prinsip-prinsip demokrasi, mengembangkan semua potensi bangsa, melindungi kaum lemah, dan menjamin kebebasan warganya. Angkatan bersenjata menjaga pertahanan bangsa dari serangan asing dan memelihara keamanan dalam negeri. Tak ada peluang bagi diktatorisme dan tirani politik, baik dari kelompok sipil maupun kekuatan militer. Karenanya diperlukan sebuah organisasi pemerintahan yang kuat, mandiri dan dapat mengakomodasi semua pihak yang sejalan dengan cita-cita perbaikan dan keadilan.

Masyarakat madani merupakan model masyarakat berkeadilan, tatkala keragaman menjadi sumber dinamika bangsa. Para kritikus kreatif konstruktif memenuhi parlemen, kaum profesional mengisi kabinet, dan orang-orang bijak yang pemberani menjaga benteng peradilan. Para pengusaha menjadi berkah bagi negara dan rakyat, demikian pula para ulama, cendekiawan dan budayawan serta seniman berdiri di garda depan peradaban bangsa. Prajurit dan perwira ABRI menjadi militer profesional, sebuah kekuatan yang menyebarkan rasa aman di hati rakyat tanpa harus kehilangan hak-hak politik yang wajar sebagai warga negara. Kalangan perempuan menjadi saudara kaum lelaki yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan fitrahnya, dan bekerjasama secara setara bagi kemajuan bangsa. Kaum muda mempunyai peran strategis sebagai pelopor peradaban untuk perbaikan. Pendeknya, setiap kelompok mengembangkan budaya demokrasi produktif, berinteraksi secara positif dengan semangat kebersamaan dalam persatuan dan kesatuan.

Partai Keadilan menetapkan jati dirinya sebagai partai kader yang mendasarkan seluruh aktivitasnya kepada cara pandang menyeluruh dalam mereformasi kehidupan sosial, politik, ekonomi, hukum, pendidikan dan budaya. Partai adalah organisasi politik rakyat yang terbuka bagi setiap orang yang meyakini landasan pemikiran dan tujuan politiknya, serta bersepakat dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.

Pendukung partai tidak bersekutu untuk memenuhi ambisi kelompok yang sempit. Sebaliknya, partai tidak lain merupakan perhimpunan atas dasar ketaqwaan, tolong menolong dalam

kontrol sosial demi tegaknya keadilan dalam realita kehidupan. Dalam hal perbedaan pendapat, partai mengambil sikap toleran dan prinsip kemudahan selama tidak bertentangan dengan nilai kebenaran.

Posisi strategis Partai Keadilan ialah berusaha menjadi gerakan yang mengkristalkan cita-cita bangsa, merefleksikan gerakan pembaharuan pemikiran (*tajdid*) dan perbaikan masyarakat (*ishlah*) dalam sejarah modern. Kami berupaya sekuat tenaga menjadi wadah bagi seluruh kalangan yang peduli dengan nasib umat dan rakyat yang tersingkirkan dalam percaturan politik dan ekonomi. Komitmen kami kepada rakyat kecil bukan sekedar slogan. Langkah-langkah berani harus segera diambil, justeru ketika pemerintahan sedang mengalami krisis kepercayaan dan masyarakat sedang mengalami krisis pangan, dan angka pengangguran serta kemiskinan meningkat tajam. Oleh sebab itu, langkah politik pemulihan kepercayaan pemerintah melalui reformasi politik dan penanggulangan krisis di tengah masyarakat melalui reformasi bidang ekonomi merupakan keharusan yang diprioritaskan.

Institusionalisasi politik dan ekonomi yang berkeadilan, selain memperkokoh struktur politiknya juga dapat mencegah totaliterianisme, anarkisme, individualisme dan dari ekspansi kapitalisme yang telah terbukti menyengsarakan rakyat. Partai Keadilan akan tetap komitmen pada upayanya dalam mewujudkan pemerataan dan peningkatan di bidang ekonomi dan tegaknya sebuah pemerintahan yang demokratis, bersih dan adil.

Untuk mewujudkan langkah tersebut perlu membangun kekuatan pribadi yang menjadi cikal bakal keluarga dan masyarakat. Keluarga dan masyarakat merupakan lingkungan dan kerangka pertumbuhan pribadi. Sedangkan individu yang baik dapat melahirkan keluarga yang baik. Keluarga yang baik dapat pula melahirkan masyarakat yang baik. Selanjutnya, masyarakat yang baik terkandung di dalamnya berbagai kecenderungan dan motivasi kebaikan dalam pribadi.

Mengingat pembangunan sebuah negara memerlukan pribadi dan masyarakat yang salih, yang layak memikul amanah yang dibebankan kepadanya, maka pembangunan pribadi menjadi

sesuatu yang niscaya. Sebab, setiap individu bertanggung jawab karena ia adalah alat masyarakat dan negara yang terpenting dalam melaksanakan tugas sosial dan politik demi kepentingan dan tujuan bersama, memperkuat peradaban insani, dan menegakkan nilai-nilai kebenaran, kebebasan (kemerdekaan), keadilan, dan permusyawaratan. Melalui negara, hak-hak manusia dan kehormatannya terjamin dan terlindungi dan terlindungi, secara setara tanpa membedakan agama, suku dan ras.

Kesalihan pribadi lahir dari ketaqwaan yang bersifat individual sedangkan kesalihan masyarakat lahir dari ketaqwaan yang bersifat kolektif. Mereka secara bersama-sama memiliki kesadaran sejarah, kesadaran tentang fakta sosial, dan kesadaran tentang keharusan melakukan perubahan sebagai perwujudan kewajibannya sebagai makhluk moral dalam melaksanakan misi otentiknya, yaitu membangun peradaban.

Kami menyadari betapa berat warisan keterbelakangan dan kemunduran yang ditinggalkan sejak masa pemerintahan kolonial hingga era penindasan domestik. Semua itu tidak mungkin diselesaikan dalam waktu singkat dan dengan upaya yang terbatas. Pencapaian cita-cita partai diyakini hanya mungkin melalui interaksi dan keterlibatan setiap warga negara dari berbagai kekuatan politik.

Kami percaya, upaya kerjasama itu akan mengubah citra bangsa Indonesia di mata dunia. Potensi bangsa akan maju pesat, dan mengantar kita untuk menemukan mata air kecemerlangan peradaban. Kami yakin proses pembelajaran bangsa menjadi lebih adil dan demokratis akan berlangsung lebih cepat, sehingga berfungsi sebagai faktor keunggulan kompetitif di tengah percaturan global.

Dengan kerendahan hati, kami ingin menjadikan keadilan sebagai misi diplomasi internasional Indonesia. Karena inilah rahmat yang belum pernah dirasakan oleh sebagian besar penduduk bumi saat ini. Kemajuan teknologi transportasi dan telekomunikasi telah menjadikan dunia ini semakin terintegrasi. Ironisnya, globalisasi berubah menjadi basis hegemoni dan imperialisme baru dari berbagai negara maju dan kuat terhadap kawasan dunia lainnya. Dengan berbekal visi kemandirian,

patriotisme, demokrasi, moderat, reformasi dan risalah Islam sebagai rahmat untuk sekalian alam. Kami **mencitakan Indonesia menjadi negara kuat yang membawa misi rahmat keadilan bagi segenap umat manusia, agar bangsanya menjadi kontributor peradaban manusia dan buminya menjelma menjadi taman kehidupan yang tenteram dan damai.**

Semoga Allah Yang Maha Kuasa segera mengangkat bangsa Indonesia dari keterpurukan sejarah akibat badai krisis multidimensional dewasa ini dan selanjutnya menapaki perjalanan hidupnya dengan penuh maghfirah dan keridlaan-Nya. Sesuai dengan sifat ideal *baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur*. Maha Suci Allah yang telah menetapkan firman-Nya, *"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena itu lebih dekat kepada taqwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."* (QS Al Maidah : 8). Shalawat dan salam kepada Utusan-Nya yang pernah bersabda, *"Makhluk yang paling dicintai Allah adalah pemimpin yang adil, sedang yang paling dibenci-Nya adalah pemimpin yang zhalim."* (*HR Ahmad*).

Hasbunallah wa ni'mal wakil.

Jati Diri Partai Keadilan

A. PENDAHULUAN

Derap langkah reformasi telah membawa iklim baru bagi kehidupan masyarakat Indonesia dalam segala bidang. Kungkungan politik yang selama ini membelenggu telah lumpuh tak berdaya. Akibatnya, berbagai aspirasi bermunculan untuk menghirup udara segar kebebasan. Partai-partai yang menjadi saluran aspirasi politik bangsa seakan-akan bangkit dari kuburnya dan berupaya memperoleh dukungan legal masyarakat

Ahad, 9 Agustus 1998, Partai Keadilan dideklarasikan di depan lebih dari 50.000 pendukungnya yang memadati lapangan luas Masjid Al Azhar, Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Partai yang berlambang gambar Ka'bah dengan dua bulan sabit yang mengapit garis lurus di tengahnya itu kehadirannya dikumandangkan dalam suasana semangat namun penuh khidmat. Gema takbir berkali-kali dilantunkan massa yang umumnya kaum muda. Sementara di penghujung deklarasi do'a yang dilantunkan membawa suasana haru diiringi isak tangis dan derai air mata.

Partai Keadilan adalah salah satu partai politik yang didirikan oleh sejumlah aktivis muslim di tengah iklim demokratis yang peluangnya dibuka oleh reformasi Indonesia. Bisa jadi, kemunculan Partai Keadilan, seperti halnya partai lain, mengundang sejumlah tanda tanya. Oleh karena itu, penjelasan gamblang yang menggambarkan berbagai sisi partai ini amat diperlukkan untuk membantu masyarakat dalam memahami dan sekaligus membuka ruang-ruang keakraban yang mengakibatkan *ukhuwah Islamiyah* semakin terjalin apik.

B. LATAR BELAKANG SEJARAH

Meski peran historis kaum muslimin dalam perjuangan Indonesia begitu besar dan menentukan, namun tak dapat diingkari adanya kenyataan bahwa Islam sering dikesankan sebuah momok yang kerap membangkitkan kecurigaan para penguasa di Indonesia. Di awal kemerdekaan Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Sukarno, dalam pidato-pidatonya telah membuka peluang demokratis bagi perjuangan Islam di Indonesia. Namun pada 1959, ia telah menutup kembali peluang itu dengan dekritnya yang disusul dengan diterapkannya Demokrasi Terpimpin yang pada hakikatnya sebuah bentuk diktatorisme. Setahun kemudian Masyumi sebagai partai umat Islam terbesar pada saat itu secara inkonstitusional dibubarkan.

Perlawanan kaum muslimin terhadap pemberontakan dan makar Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 1965 membuktikan kebenaran kekokohan sikap umat Islam pada masa Orde Lama.

Komunisme yang telah berkali-kali mengobarkan pemberontakan di Indonesia terbukti tetap bertahan pada garisnya, yakni atheisme, anarkisme dan radikalisme. Anehnya, pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto justru mengembangkan sikap apriori terhadap umat Islam, sebuah langkah yang sangat bertolak belakang dengan tuntutan realita. Pemerintahan Orde Baru senantiasa menebar semangat kecurigaan dan kebencian dengan apa yang disebut dengan "ekstrim kanan" dan kemudian memunculkan isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan). Upaya-upaya untuk mengeliminir peran umat Islam pun dilakukan dengan sangat sistematik melalui penyederhanaan partai dan penetapan asas tunggal. Sementara permohonan untuk merehabilitir Masyumi tak pernah berhasil dilakukan.

Selanjutnya, tekanan-tekanan terhadap umat Islam khususnya, kebebasan berpendapat umumnya, telah melahirkan fenomena tersendiri dalam strategi perjuangan umat Islam. Apalagi setelah dunia perguruan tinggi pun terkena imbas otoritarinisme pemerintah dengan diterapkannya konsep NKK/BKK. Para aktivis intelektual muslim merasakan semakin sempit ruang gerak kebebasan bagi dakwah menebar kebenaran dan kebaikan di Indonesia.

Awal tahun delapan puluhan gerakan-gerakan keislaman yang mengambil masjid-masjid sebagai basis operasional dan strukturalnya, terutama masjid kampus mulai bersemi. Gerakan dakwah ini merebak dari tahun ke tahun mewarnai suasana keislaman di kampus-kampus dan masyarakat umum. Bahkan menjalar pula ke kalangan pelajar dan mahasiswa di luar negeri, baik di Eropa, Amerika maupun Timur Tengah. Gejolaknya muncul dalam bentuk pemikiran keislaman dalam berbagai bidang dan juga praktik-praktik pengamalan ajaran sehari-hari. Persaudaraan (*ukhuwah*) yang dibangun di antara mereka menjadi sebuah alternatif cara hidup di tengah-tengah masyarakat yang cenderung semakin individualistik. Sementara komitmen mereka terhadap nilai-nilai moral pun menjadi warna khas di tengah-tengah badai faham materialistik yang melahirkan perilaku hedonistik.

Tatkala gerakan dakwah ini semakin membesar dan mengental

maka sayap-sayap yang digelutinya pun semakin luas. Di kancah masyarakat mereka berupaya membangun ruh keislaman melalui media tabligh, seminar, aktivitas sosial, ekonomi dan juga pendidikan. Sementara itu dalam bidang politik mereka mencoba menyadarkan kepada masyarakat muslim, khususnya kalangan pemuda dan mahasiswa, akan tanggung jawabnya terhadap masa depan Indonesia. Sebab, jika bangsa ini hancur maka yang akan merasakan kerugian serta kesengsaraannya adalah kaum muslimin juga. Ini menuntut sebuah gerakan reformasi.

Dengan demikian reformasi yang tak lain adalah sebuah "*harakatul ishlah*" menjadi sebuah komitmen langsung dari gerakan dakwah Islam yang berkembang. Oleh karenanya para pemuda dan mahasiswa muslim aktivis gerakan dakwah Islam pun ikut terlibat dalam proses perubahan yang puncaknya berlangsung pada Mei 1998 yang lalu.

Umat Islam yang telah begitu banyak mendapat tekanan (ingat kasus Tanjung Priok, Aceh, Lampung, dan lain-lain) tentu berharap agar kehidupan keberagamaan dan kenegaraan mereka dapat berubah ke arah yang lebih baik. Dari kampus khususnya, mereka melakukan unjuk rasa dan unjuk kepedulian di berbagai tempat dan kesempatan yang salah satu keberhasilannya adalah lengsernya Soeharto.

Lengsernya Soeharto memungkinkan iklim kebebasan mulai terkuak. Akan tetapi bukan berarti perjuangan untuk merealisir cita-cita dakwah sudah selesai. Perjalanan itu masih panjang karena dalam berbagai bidang kehidupan umat Islam masih berada dalam jurang keterbelakangan. Pandangan dan cara hidup mereka masih jauh dari tuntunan ajaran Islam. Struktur kelembagaan yang ada dalam masyarakat belum kondusif bagi upaya penumbuhan kepribadian Islam yang dicita-citakan. Sedangkan dalam bidang kesejahteraan umat Islam dapat dikatakan sebagai penghuni terbesar dari mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Perjuangan gerakan dakwah harus dilanjutkan. Musyawarah yang dilakukan oleh para aktivis dakwah Islam akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan bahwa iklim yang berkembang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi upaya peraihan cita-cita,

mewujudkan bangsa dan negara Indonesia yang diridhai Allah SWT. Pendirian partai politik yang berorientasi pada ajaran Islam perlu dilakukan guna mencapai tujuan dakwah Islam dengan cara-cara demokratis yang bisa diterima banyak orang. Maka merekapun sepakat mengokohkan sebuah partai politik yang diberi nama **Partai Keadilan**.

Partai Keadilan didirikan bukan atas inisiatif seseorang atau beberapa orang aktivisnya, namun merupakan perwujudan dari kesepakatan yang diambil dari musyawarah yang aspiratif dan demokratis. Sebuah survey yang melingkupi cakupan luas dari para aktivis dakwah, terutama yang tersebar di masjid-masjid kampus di Indonesia dilakukan beberapa bulan sebelumnya untuk melihat respon umum dari kondisi politik yang berkembang di Indonesia. Hasil survey menunjukkan bahwa sebagian besar mereka menyatakan bahwa saat inilah waktu yang tepat untuk meneguhkan aktivitas dakwah dalam bentuk kepartaian dalam konteks formalitas politik yang ada sekarang. Survey ini mencerminkan tumbuhnya kesamaan sikap di kalangan sebagian besar aktivis dakwah yang dapat menjadi sebuah pola dinamis bagi pengendalian partai di kemudian hari. Terbukti setelah tekad mendirikan sebuah partai diputuskan maka kesatuan sikap secara menyeluruh menjadi kenyataan.

Atas dasar kenyataan-kenyataan yang melatar belakangi sejarah berdirinya Partai Keadilan itu maka dipandang wajar jika para fungsionaris partai ini adalah mereka yang tergolong muda. Sebab, mereka mewakili sebuah generasi baru yang sebagian terbesarnya lahir, hidup dan berjuang di tengah-tengah kemapanan dan ketiranikan Orde Baru.

C. LANDASAN FILOSOFIS

Landasan filosofis berdirinya Partai Keadilan merupakan cerminan dari cara pandang aktivisnya terhadap Islam dalam satu sisi dan terhadap langkah-langkah berjenjang peraihan cita-cita dakwah Islam di sisi lain. Pokok-pokok pikiran yang melandasi pendirian partai ini ialah kenyataan bahwa manusia sebagai Khalifah Allah di bumi tidak mungkin mengelak dari tanggung

jawabnya melaksanakan misi *khilafah*, yaitu memelihara, mengatur, dan memakmurkan bumi yang merupakan aktivitas politik yang paling otentik. Disadari, keluhuran misi ini merupakan amanah dari Allah SWT yang wajib ditunaikan oleh setiap insan sesuai dengan hukum-hukum-Nya yang dimanifestasikan dalam *ayat-ayat qawliyah* dan *ayat-ayat kawniyah*-Nya.

Disadari pula bahwa mengakui eksistensi diri, melestarikan dan mengembangkannya, serta menundukkannya pada determinasi nilai-nilai moral dan etika hukum Allah adalah syarat-syarat yang tanpanya ciptaan itu akan kehilangan makna. Karena itu manusia selain mengakui eksistensi dirinya sebagai pembawa amanah ia juga bersedia untuk diatur dengan hukum-hukum Allah yang tertuang dalam din al-Islam yang bersifat universal.

Universalitas Islam telah menjadi inti pemahaman kaum Muslimin terhadap konsep-konsep Islam dalam seluruh dimensinya. *"Islam adalah sistem hidup yang universal, mencakup seluruh aspek kehidupan. Islam adalah negara dan tanah air, pemerintahan dan umat, moral dan kekuatan, rahmat dan keadilan, kebudayaan dan perundang-undangan, ilmu dan peradilan, materi dan sumber daya alam, usaha dan kekayaan, jihad dan dakwah, tentara dan fikrah, aqidah yang lurus dan ibadah yang benar."* Keuniversalan itu sebagai inti dan pokok-pokok ajaran Islam yang bernilai perintah kepada kaum Muslimin untuk diterapkan secara utuh. Islam adalah suatu tata hidup yang meliputi agama, politik, negara, dan masyarakat.

Dengan demikian, setiap Muslim mempunyai tujuan dan sekaligus sambutan terhadap perintah Allah yang wujud dalam bentuk penyerahan diri yang total kepada-Nya. Perintah Allah itu sendiri mencakup kehidupan individu dan sosial. Sedangkan penyerahan diri yang total kepada Allah dan kesediaan menerima dan melaksanakan perintah-perintah-Nya merupakan jalan hidup, pola Ilahi bagi masyarakat, atau syari'at.

Para pendiri dan pendukung Partai Keadilan meyakini bahwa keuniversalan ajaran Islam melingkupi seluruh bidang kehidupan manusia dan kemanusiaan. Islam bukanlah sebuah ajaran sempit yang hanya mengatur hubungan manusia dengan Penciptanya, tetapi juga melingkupi aturan-aturan dalam cara berhubungan

antar manusia dengan manusia lainnya dan juga dengan alam semesta ini. Mereka menyadari sepenuhnya bahwa kemuliaan manusia terletak pada konsistensi penerapan nilai-nilai *ilahiyah* dalam seluruh dimensi kehidupannya. Totalitas hidupnya tunduk kepada determinisme nilai-nilai luhur itu.

"Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, tetapi mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan, yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para Nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas." (QS. Ali Imran : 112)

"Hai orang-orang yang beriman masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." (QS. Al Baqarah : 208)

Konsekuensinya, setiap muslim tidak boleh mencukupkan dirinya dengan mengamalkan sebagian saja dari ajaran Islam yang luas itu dan mengabaikan pengamalan ajaran-ajaran lainnya. Sosial, politik, ekonomi, budaya adalah bidang-bidang yang terkait erat dengan kehidupan seorang muslim yang harus dimasukinya. Ketimpangan kaum muslimin dalam salah satu bidang menyebabkan gangguan menyeluruh terhadap kehidupan masyarakat muslim. Bagi kaum muslimin upaya-upaya menegakkan Islam di seluruh dimensi kehidupan merupakan satu keniscayaan. Karena itu, mendirikan Partai Keadilan merupakan upaya memasuki dimensi politik sebagai bagian dari dimensi-demensi kehidupan manusia dan sekaligus menjadi cerminan aktualisasi universalitas Islam dalam rangka mewujudkan keseimbangan hidup. Partai politik merupakan sarana efektif dalam upaya mewujudkan sebuah struktur masyarakat muslim.

Kendati pendirian partai politik merupakan sebagian dari komitmen muslim dalam bidang politik, namun pada kenyataannya dapat menjadi sebuah alternatif sarana bagi langkah-langkah perjuangan politik kaum muslimin. Langkah-langkah ini merupakan bagian integral dari tugas dakwah yang diemban

oleh umat Islam.

Dalam realitas sosial di negeri-negeri Muslim menuntut pemberian kesempatan bagi munculnya sebuah partai Islam. Aspirasi umat dalam mewujudkan cita-cita politik tidak pernah padam mengingat tugas dakwah, amar ma'ruf nahi munkar identik dengan eksistensi umat. Karena itu, pemberian wadah secara legal formal merupakan bagian dari pemungsian efektif peran pemberdayaan umat, baik psikologis, sosiologis, ekonomis ataupun politis dalam satu sisi, dan di sisi lain dapat menghindari kemungkinan terjadinya ekstremitas akibat penekanan terhadap peran politik umat. Partai merupakan bentuk yang terkonsep dalam aktivitas politik guna mengekpresikan keinginan umat.

Selanjutnya, para pendiri dan pendukung Partai Keadilan meyakini bahwa cita-cita dakwah Islam memiliki jalan panjang yang harus dilalui tahap demi tahap. Besar dan beratnya beban persoalan yang dihadapi umat menyebabkan demikian banyak agenda yang harus dilakukan. Demikian pulalah sunnah kauniyah yang dijalani oleh Rasulullah SAW dalam perjuangan dakwahnya. Setiap pekerjaan dakwah dilakukan sesuai dengan prasyarat yang mendukungnya. Bekal dan kesiapan diri merupakan prasyarat seseorang dalam memasuki kancah perjuangan.

"Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka : Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat.' ..." (QS. An Nisaa : 77)

"Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik." (QS. Al Muzzammil : 10)

Oleh karena itu para aktivis dakwah senantiasa jeli melihat peluang yang ada sehingga mereka dapat menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Dalam setiap perjalanan dakwah terdapat momentum-momentum yang diberikan Allah kepada umat. Kewajiban para aktivis adalah memanfaatkan momentum tersebut seoptimal mungkin untuk kepentingan dakwah. Dengan optimalisasi pemanfaatan momentum tersebut diharapkan terjadi akselerasi perkembangan dakwah seraya tetap mempertimbangkan tahapan-tahapan logisnya. Dengan tetap berpijak pada tahapan-tahapan itu maka perjalanan dakwah dapat berjalan dengan terencana dan berkelanjutan hingga mencapai sasaran terakhirnya.

Pada tahap tertentu pembinaan-pembinaan masyarakat umum merupakan sebuah langkah strategis bagi dakwah Islam. Pada tahap lain pendirian lembaga-lembaga sosial dan pendidikan merupakan langkah yang harus dilakukan dalam kerangka pembinaan umat secara lebih meluas dan lebih terstruktur. Demikian pula tatkala berbagai syarat terpenuhi, di antaranya adalah iklim kebebasan berpendapat dan berserikat, maka pendirian partai politik adalah sebuah keniscayaan guna memperoleh legitimasi formal dalam aktivitas dakwah yang dilakukan. Dalam kerangka inilah Partai Keadilan dideklarasikan oleh para aktivisnya.

Para pendiri Partai Keadilan yakin pula bahwa jahriyyatu al-dakwah merupakan asal aktivitas dakwah. Dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW pada periode Makkah yang oleh sebagian sejarawan dilukiskan sebagai tahap sirriyatu al-dakwah hanyalah semata-mata respon dari kondisi represif yang dimunculkan dari lingkungannya. Namun tatkala kondisi itu sudah dapat diantisipasi maka beliau pun kembali menyiarkan Islam secara terang-terangan dan terbuka. Ini adalah sebuah uslub (pendekatan) yang dilakukan para Nabi Allah, sebagaimana yang dikatakan Nuh AS:

"Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka (kepada iman) dengan cara terang-terangan, kemudian sesungguhnya aku (menyeru) mereka (lagi) dengan terang-terangan dengan diam-diam." (QS. Nuh : 8-9)

Semakin kondusif suasana lingkungan yang mengitari dakwah dan semakin tinggi tahap pencapaian cita-citanya maka akan semakin terbuka langkah-langkah yang harus dilakukan. Gerakan terbuka semakin menegaskan eksistensi sebuah gerakan dakwah dan akan semakin banyak anggota masyarakat yang turut berpartisipasi dalam dakwah. Atas dasar kenyataan ini para aktivis dakwah Islam menegaskan kehadiran Partai Keadilan sebagai partai dakwah yang merupakan kelanjutan dari perjalanan pan-

jang dakwah itu sendiri.

Di bagian lain, beramal jama'i merupakan sunnah kawniyah, tata alamiah dan sekaligus tuntutan syar'i. Karena itu para pendiri dan pendukung Partai Keadilan mencoba menghidupkan kembali prinsip kejama'ahan di antara para aktivisnya sesuai dengan perintah Allah SWT dan tuntunan Rasul-Nya. Mereka berupaya saling mengenal, saling memahami, saling menolong dan hidup sepenanggungan dalam berbagai keadaan yang menyertainya. Mereka bekerja sama dalam kebaikan dan ketaqwaan dan bekerja sama dalam upaya menghilangkan kemaksiatan dan permusuhan. Cara hidup inilah yang diupayakan ditebarkan di tengah-tengah umat.

"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan janganlah kamu bercerai berai..." (QS. Ali Imran : 103).

Partai (hizb) dipandang sebagai sebuah manifestasi kejama'ahan, dengan seluruh ciri-ciri khasnya, dalam bentuknya yang solid yang bergerak dalam urusan atau orientasi tertentu. Soliditas sebuah partai ditentukan oleh faktor-faktor ideologis. Oleh karenanya wajar jika sebuah partai terdiri dari himpunan orang-orang yang lintas suku, ras, warna kulit, atau bahasa namun ideologinya satu. Adalah nyaris mustahil sebuah partai menjadi solid jika para pendukungnya terdiri dari para penganut berbagai ideologi. Sedangkan orientasi ideologi ini menjadi ciri penentu bagi sebuah kelompok manusia apakah ia akan termasuk Hizbullah ataukah Hizbusysyaithan sebagaimana kategorisasi Al Qur'an (QS. Al Maidah : 56).

Memilih dan menegakkan Hizbullah merupakan sebuah kemestian bagi umat dalam realisasi potensi kemerdekaan yang dianugerahkan Allah SWT kepada manusia. Sebab, perjalanan komunitas manusia merupakan gerak maju menghadapi pilihan-pilihan dialektis yang dihadapinya, antara tatanan yang adil dan yang tidak adil, antara tatanan yang hak dan yang batil, antara tatanan yang berintikan tauhid dan yang berintikan syirik, antara tatanan yang menyelamatkan dan yang membinasakan bagi seluruh perjalanan hidupnya.

Aktivitas yang telah dilakukan para aktivis dakwah jauh sebelum Partai Keadilan dideklarasikan dipandang sebagai sebuah perwujudan kehidupan berpartai dalam arti yang paling asasi. Partai yang sesungguhnya adalah partai yang memiliki cita-cita memperjuangkan kalimah Allah SWT di muka bumi ini dan menebarkan rahmat-Nya untuk umat manusia. Partai didirikan dalam rangka membangun kesadaran umat terhadap eksistensi dirinya dan menghimpunnya dalam sebuah barisan yang solid, kuat dan teratur. Dalam makna ini pula sebuah partai yang hakiki tidak akan bekerja hanya sekedar untuk turut serta dalam pemilihan umum dan tidak akan bubar hanya lantaran kalah dalam jumlah perolehan suara. Mewujudkan bangsa dan negara Indonesia yang diridhai Allah SWT jauh lebih mulia dari sekedar turut dalam pemilihan umum.

D. PEMILIHAN NAMA

Keadilan telah dipilih menjadi nama partai. karena ia adalah *sunnah kauniyah* yang menjadi ciri alamiah segala sesuatu. Di atas prinsip inilah Allah menciptakan langit dan bumi. Menurut *salafu al-shalih* keadilan ialah meletakkan sesuatu di tempatnya tanpa melampaui batas. Sebab, melampaui batas itu adalah dosa dan perkosaan. Setinggi-tinggi derajat keadilan adalah keadilan aqidah dalam mengakui keesaan Allah, hak-Nya untuk disembah bukan ditentang, disyukuri bukan diingkari, untuk diingat bukan dilupakan. Sebab, Dialah Yang Esa, Yang Tunggal dalam ketuhanan, dalam suatu kebolehan yang tidak dipatahkan oleh sesuatu, dalam suatu hikmah yang di atasnya tegak kekuasaan langit dan bumi. Barangsiapa tidak adil pada aqidahnya maka telah menganiaya diri sendiri dan mendapat murka Allah. Firman Allah, *"Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zhalim"*.

Keadilan, sebagai salah satu prinsip dan doktrin politik Islam, ialah pandangan yang menegaskan tentang kesatuan manusia. Islam memandang bahwa manusia diciptakan dari asal yang satu (49 : 13; 4 : 1). Keadilan membuka jalan bagi nilai-nilai kebenaran, kebaikan, ketaqwaan, keindahan, dan kebahagiaan. Keadilan bukan hanya menyediakan ruang bagi setiap

orang untuk mendapatkan hak-hak asasinya sebagai manusia, tetapi mewadahi semua potensi inovasi dan kreativitasnya. Keadilan menebarkan rasa aman dan membebaskan manusia dari semua bentuk intimidasi dan rasa takut.

Oleh karena kenyataan itulah maka perintah menegakkan keadilan menjadi sebuah perintah yang universal sebagaimana yang tergambar dalam banyak ayat Al Qur'an. Dalam konteks keindonesiaan, keadilan adalah sebuah nilai yang tentu sangat didambakan umat sesudah mereka tertindas oleh rezim Orde Baru maupun Orde Lama.

Selain itu Islam juga menetapkan bahwa asal kejadian manusia dan posisinya sebagai makhluk Allah adalah sama. Rasulullah SAW bersabda, *"Wahai manusia, ketahuilah bahwa Rabbmu itu satu, tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas orang bukan Arab, bagi orang bukan Arab atas orang Arab, bagi orang hitam atas orang merah atau bagi orang merah atas orang hitam kecuali dengan taqwanya. Sesungguhnya orang yang paling mulia disi Allah ialah orang yang paling bertaqwa." (HR Baihaqi)*.

Atas dasar kenyataan itu, Islam menentukan perlakuan terhadap manusia dan pengakuan terhadap keberadaan serta hak-hak politik dan sosialnya berlandaskan pada keadilan dan persamaan, sebagai nilai moral yang tercantum dalam syari'at dan mempunyai pengaruh nyata pada kedudukan individu dan masyarakat. Konsekuensinya umat Islam wajib menegakkan keadilan tersebut dalam seluruh tingkat kehidupan : pribadi, keluarga, masyarakat dan negara. Keadilan yang harus ditegakkan ini sekaligus menjadi standar keberhasilan manusia melaksanakan tugas khilafahnya di bumi serta merupakan refleksi utuh konsistensi penentu kebijakan politik dengan syari'at dan aturan-aturan Allah.

Keadilan dan persamaan *(al-'adlu wa al-musawat)* telah menjadi prinsip politik yang mesti diwujudkan oleh setiap pemerintahan. Prinsip ini merupakan refleksi total dari tanggung jawab memikul amanah yang dibebankan kepada manusia, yaitu amanah risalah dan amanah ibadah. Oleh sebab itu, Islam memandang seluruh manusia sama kedudukannya di hadapan hukum dan undang-undang.

Selain itu, keadilan sebagai syarat pokok bagi semua bentuk pemerintahan yang sah. Alasannya ialah, "keadilan merupakan ciri alamiah segala sesuatu. Bila keadilan menjadi dasar bentuk suatu pemerintahan, maka sangat mungkin kesuksesan akan diraih, siapapun yang mengendalikan pemerintahan itu. Sebaliknya, pemerintahan yang zhalim mungkin sekali terjerumus dalam kehidupan tanpa arti meskipun terbungkus dengan berbagai ragam kewajiban pemerintah".

Namun keadilan tak mungkin wujud kalau nilai-nilai dan aturan Allah tidak ditegakkan. Karena itu apabila keadilan telah menjadi fenomena umum dalam kehidupan manusia, maka kehidupan akan seimbang. Sedangkan keseimbangan hidup akan melahirkan kebahagiaan yang ditandai oleh adanya ketenteraman dan kesejahteraan yang merata. Sebaliknya, bila keadilan tidak menjadi acuan utama kehidupan maka kehidupan manusia akan sengsara. Sedangkan sumber ketidakadilan adalah interfensi hawa nafsu yang terus-menerus dirangsang dan dikobarkan oleh aturan-aturan dan hukum-hukum yang didasari oleh hawa nafsu manusia. Segala bentuk ketidakadilan sangat dikecam dalam Islam. Sebuah hadits yang disebut dalam Musnad Imam Ibnu Hambal menegaskan, *"Makhluk yang paling dicintai Allah adalah pemimpin yang adil, sedangkan makhluk yang paling dibenci Dia adalah pemimpin yang zhalim."*

E. KARAKTERISTIK

Banyak partai didirikan dengan masing-masing karakteristiknya yang melambangkan keunikan sekaligus kekuatan partai tersebut. Karakteristik Partai Keadilan yang melekat di tubuhnya antara lain:

1. Moralis

Karena manusia adalah makhluk Allah yang dikirim ke bumi untuk menjadi khalifah-Nya (2 : 30), maka ia menjadi satu-satunya makhluk pengemban "amanah peradaban". Ia adalah satu-satunya makhluk yang memikul tugas memakmurkan bumi

yang seluruh kiprahnya berfungsi sebagai *ibtila* dan *mi'yar* (standar) bagi kehidupan akhirat, suatu kehidupan yang lebih baik dan langgeng. Karena posisinya itu maka setiap perbuatan manusia berdimensi kesemestaan. Perbuatan atau tindakan politik yang membawa kebaikan manusia, oleh manusia sendiri, bernilai kebaikan dan keluruhan kosmis. Demikian pula halnya jika manusia melakukan perbuatan buruk (30 : 41). Ini menuntut tanggung jawab bagi seluruh aktivitas yang dilakukannya.

Tanggung jawab tersebut lahir dari kesadaran bahwa manusia terdiri dari realitas perorangan yang merdeka dan tidak terbagi-bagi, maka masing-masing individu secara sendiri-sendiri pula mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya dalam pengadilan Ilahi di akhirat nanti (75 : 36; 6 : 164). Setiap manusia, secara perorangan, dituntut untuk menampilkan diri sebagai makhluk moral yang bertanggung jawab terhadap seluruh perbuatannya dalam melaksanakan tujuan dan misi otentiknya di dunia tanpa kemungkinan didelegasikan kepada orang lain (6 : 94).

Partai Keadilan berupaya menjadikan komitmen moral sebagai ciri seluruh perilaku individu dan politiknya. Partai berusaha menampilkan sisi moralitas yang bersumber pada nilai-nilai Islam ini sebagai basis serta keteladanan. Pertimbangan moral akan selalu menjadi tonggak dalam program dan aktivitas yang digulirkan. Karena itu, komitmen moral dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting pada perjalanan sebuah bangsa atau umat. Sebab, keunggulan intelektualitas dan materi terbukti tidak memiliki manfaat sama sekali jika sisi moral ini diabaikan. Krisis besar yang terjadi di berbagai negara termasuk di Indonesia, antara lain bersumber dari masalah tak terkendalinya akhlaq manusia pemangku kepemimpinan bangsa dan bahkan rakyat bangsa itu sendiri. Memang, seperti dinyatakan Allah SWT dalam al-Qur'an, segala bentuk krisis yang melanda umat manusia merupakan akibat logis dari arogansi, kesombongan dan ketamakan manusia sendiri. Segala bentuk ketimpangan dan ketidakseimbangan hidup merupakan buah dari kezhaliman dan kekufuran yang dilakukan manusia. Berbagai bentuk kerusakan yang mengepung kita sekarang ini merupakan akibat dari ulah tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, akibat

dari sikap sombong dan congkak, akibat dari kezhaliman dan kekufuran manusia terhadap ni'mat-ni'mat dan karunia Allah.

"Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar ni'mat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan?" (QS. Ibrahim : 28)

"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut akibat ulah tangan-tangan manusia." (QS. Al-Rum : 41)

Dalam tataran individu krisis-krisis yang melanda masyarakat modern memunculkan individu-inividu yang terkena kekalutan mental. Penyakit kekalutan mental ini yang mengakibatkan seseorang terserang konflik batin yang mengakibatkan komunikasi sosialnya terputus serta memunculkan gangguan intlektual dan emosional yang cukup serius. Kekalutan mental ini bisa diakibatkan oleh kepribadian yang lemah, atau oleh karena konflik-konflik sosial, politik dan kultural yang mempengaruhi diri manusia, atau dikarenakan oleh pemasakan batin dari pengalaman yang keliru.

Dalam tingkat kemasyarakatan krisis yang terus-menerus menghantui itu dapat memunculkan krisis kepemimpinan politik, krisis kepercayaan, krisis aparat, krisis solidaritas, krisis keamanan dan krisis nilai. Keenam krisis tersebut jelas memastikan sakitnya sebuah masyarakat. Dan kita, secara jujur harus mengakui bahwa masyarakat kita tengah dilanda krisis-krisis itu. Masyarakat kita adalah masyarakat yang sedang sakit. Rasulullah SAW mengkhawatirkan kalau krisis-krisis itu terjadi di tengah-tengah masyarakat Muslim sebagaimana diriwayatkan seorang shahabat sebagai berikut :

"Saya mendengar Rasulullah SAW pernah mengkhawatirkan pada umatnya bila terjadi enam hal. Anak-anak dijadikan pemimpin, banyak polisi, korupsi dalam pemerintahan, pemutusan tali persaudaraan, memudahkan pertumpahan darah dan generasi yang memperlakukan al-Qur`an sebagai bagian dari kesenian, mereka mengutamakan seseorang bukan karena kefaqihan dan keutamaannya tapi karena kepandaiannya dalam berseni sastera." (HR

Ahmad)

Sedangkan sakitnya sebuah masyarakat digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam haditsnya yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la:

"Bagaimana kalian, jika wanita-wanita telah bejat, para pemuda berbuat fasik dan kalian meninggalkan jihad? Para shahabat bertanya, "Apakah hal demikian bakal terjadi wahai Rasulullah?" Nabi menjawab, "Benar, dan demi yang diriku dalam genggaman-Nya, lebih dahsyat dari itu pun bakal terjadi. Bagaimana kalian jika tidak memerintahkan yang ma`ruf dan mencegah dari yang munkar?" Para shahabat bertanya, "Apakah hal itu bakal terjadi wahai Rasulullah" Nabi menjawab, "Benar, dan demi yang diriku berada dalam genggaman-Nya, lebih hebat dari itupun bakal terjadi." Mereka bertanya, "Apakah yang lebih hebat itu?" Nabi menjawab, "Bagaimana kalian jika memandang yang ma'ruf sebagai yang munkar dan memandang yang munkar sebagai yang ma'ruf." Para shahabat bertanya, "Apakah hal demikian bakal terjadi?" Nabi menjawab, "Benar, dan demi yang diriku dalam genggaman-Nya, lebih dahsyat dari itu pun bakal terjadi. Bagaimana kalian jika kamu memerintahkan yang munkar dan melarang yang ma'ruf?" Para shahabat bertanya, "Apakah hal demikian bakal terjadi?" Nabi menjawab, "Benar, lebih hebat dari itu pun bakal terjadi. Allah SAW berfirman dalam hadits Qudsi, "Demi Diriku, Aku bersumpah akan kutimpakan kepada mereka fitnah di mana orang-orang bijak menjadi kebingungan."

Pentingnya moralitas bagi para aktivis terlihat jelas pada perintah Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW:

"Wahai orang yang berselimut. Tegaklah dan beri peringatan. Tuhanmu, agungkanlah. Pakaianmu, sucikanlah. Dosa-dosa, hindarkanlah. Jangan engkau memberi demi mengharap balasan yang lebih banyak. Dan demi Tuhanmu, bersabarlah." (QS. Al Muddatsir : 1-7).

2. Profesional

Itqan (berkualitas tinggi) dan *ihsan* (baik) merupakan ciri alamiah seluruh ciptaan Allah. Kerja-kerja yang itqan dan ihsan melahirkan profesionalitas yang dilandasi skil dan kecenderungannya. Namun aspek moral harus selalu menjadi pijakan profesionalitas agar perilaku dan aktivitas yang dikembangkan tidak mengalami deviasi (penyimpangan) dari tujuan yang hendak dicapai. Sebab, di atas landasan moral, profesionalitas akan berkembang secara positip dan mempunyai nilai tambah yang tinggi.

Profesionalitas yang bercirikan pada penguasaan detail masalah akan mengantarkan partai pada kebijakan-kebijakan yang tepat dan bertanggung jawab atas berbagai masalah yang dihadapi baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan budaya. Pembentukan pribadi dengan memperhatikan intelektualitas, sikap kritis dan sensitivitas karenanya sangat ditekankan dalam aktivitas partai.

"Katakanlah, tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Maka Rabbmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya." (QS. Al-Isra : 84)

Profesionalitas juga lahir dari kondisi yang penuh kebebasan. Namun kebebasan yang ditekankan dan dilindungi oleh Islam adalah kebebasan yang bertanggung jawab, atau kebebasan yang dilaksanakan atau dinyatakan dalam rangka rasa tanggung jawab. Dalam Islam tanggung jawab merupakan pangkal dan ujung kebebasan. Tanggung jawab adalah pengawas kebebasan, pagar yang melindungi dari penyelewengan ke arah berlebih-lebihan, anarki, pelanggaran terhadap hak-hak orang lain, dan juga penyelewengan ke arah merendah-rendahkan nilai-nilai. Tanggung jawab lahir dari kesadaran bahwa manusia sebagai makhluk moral akan dimintai pertanggungjawaban secara individu di hadapan Allah SWT terhadap semua apa yang dilakukannya di dunia.

"Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sebesar dzarrah pun niscaya dia akan melihat (hasilnya). Dan barangsiapa yang mengrjakan keburukan sebesar dzarrah pun niscaya dia akan melihat (hasilnya) pula." (QS. Al Zalzalah : 7-8).

Individu-individu yang melepaskan diri dari tanggung jawab-tanggung jawab moral dan kewajiban-kewajiban sosial, secara membabi buta meniru pihak-pihak yang berkuasa, memuja-muja pahlawan, dan bersikap apatis dan netral di saat-saat krisis moral akan mencelakakan seluruh masyarakat, baik kepada manusia-manusia yang merasa puas, manusia-manusia yang hanyut tanpa tujuan, maupun manusia-manusia yang secara aktif melakukan perbuatan-perbuatan aniaya.

3. Patriotik

Kehidupan partai adalah kehidupan perjuangan. Sedangkan partai merupakan salah satu sarana dakwah Islam yang bertujuan menegakkan nilai-nilai Islam di bumi. Bagi para kader partai berjuang di jalan Allah adalah sebuah kewajiban yang harus dijalani demi tegaknya wibawa umat dan kemanusiaan umumnya. Balasan yang dinanti-nantikan hanyalah luasnya surga Firdaus. Adapun hasil yang dipetik di dunia ini hanyalah merupakan buah perjuangan yang harus senantiasa disyukuri. Di atas landasan inilah semangat dikobarkan dalam upaya meraih cita-cita masa depan, semangat yang selalu muda, tak pernah menjadi renta lebih-lebih mati.

"Wahai orang-orang yang beriman maukah Kutunjukkan tentang sebuah perniagaan yang membebaskan kamu dari api neraka? Kamu beriman kepada Allah, dan Rasul-Nya, dan berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa kamu. Hal itu lebih baik bagi kamu, jika kamu mengetahui. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggi yang baik di dalam surga 'adn. Itulah keberuntungan yang besar." (QS. Ash Shaff : 10 –12)

4. Moderat

Manusia diciptakan Allah dalam keadaan adil dan seimbang, dilengkapi dengan potensi diri yang sempurna (82 : 6-8; 95 : 4), ditundukkannya potensi alam sebagai fasilitas baginya (31 : 20), dan diberinya agama kebenaran serta kemerdekaan untuk memilih dengan penuh tanggung jawab (6 : 164). Karena seluruh ciptaan Allah memiliki keseimbangan dan keadilan, maka sifat pertengahan telah menjadi sifat alamiah. Karena itu, pemikiran, pandangan dan sikap-sikap moderasi, berimbang dan pertengahan serta saling melengkapi bagi manusia dan kehidupan merupakan sikap obyektif yang selaras dengan tata alamiah. Sikap semacam ini merupakan refleksi dari pandangan yang menggambarkan jalan tengah yang telah menjadi ciri umat pilihan, umat yang jauh dari sikap berlebih-lebihan dan pengabaian.

Oleh sebab itu, dalam menghadapi berbagai persoalan penting, Partai Keadilan akan tetap menonjolkan sikap adil dan imbang. Ia akan tetap berada dalam posisi pertengahan dan selalu menyeru kepada kemudahan selama tidak bertentangan dengan nilai kebenaran Islam itu sendiri. Sebab Islam dalam seluruh dimensinya mempunyai karakter "pertengahan". Karakteristik inilah yang membentuk keunikan peradaban Islam, kekhasan konsep-konsepnya, serta perilaku umatnya. Sikap "pertengahan" dan "universalitas" Islam ini selaras dengan fithrah orisinal manusia. Keduanya dijadikan sebagai *shibghah* Allah yang seyogyanya menjadi *shibghah* umat Islam (2 : 143).

Kenyataan, dalam konsepsi Islam tidak dikenal adanya kontradiksi antara pasangan istilah seperti *dunya-akhirat* dan *din-dawlah*. Kendati pasangan-pasangan ini menunjukkan adanya perbedaan konseptual dan mengesankan adanya dikotomi; tetapi dengan sikap "pertengahan" Islam, tidak menjadikannya sebagai sesuatu yang kontradiktif. Ia merupakan kesatuan yang saling melengkapi dan menyempurnakan.

Mengingat persoalan-persoalan politik —berkaitan dengan pengertian dan sistemnya— adalah bagian integral dari universalitas dan sifat pertengahan Islam yang selaras dengan fitrah manusia dan tata alam semesta, maka seluruh muatan dan perilaku politik harus mencerminkan karakteristik Islam tersebut dan

merupakan refleksi utuh dari konsepsi Islam tentang alam dan manusia. Karena itu, konsepsi Islam tentang alam, manusia, dan kehidupan menjadi landasan utama pengertian, konsep dan paradigma politik Islam dalam membangun kehidupan politik.

Partai Keadilan yakin, pandangan dan sikap pertengahan dapat menghindarkan munculnya ekstremitas dan melahirkan sejumlah kemudahan serta mendatangkan keberpihakan terhadap dakwah sesuai dengan hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

"Buatlah yang lebih mudah dan jangan mempersulit, buatlah mereka suka dan jangan buat mereka lari." (Muttafaq Alaih)

5. Demokrat

Islam menetapkan bahwa alam (makhluk) diciptakan oleh Allah SWT (25 : 3). Karena Allah adalah satu-satunya yang menciptakan alam (42 : 11), maka Dia pula satu-satunya Pemilik (53 : 31) Pemberi rezeki (51 : 58) dan Pengaturnya (10 : 31). Realitas itu memastikan bahwa hanya Allah Penguasa segala ciptaan-Nya (5 : 17). Berarti, pemilik mutlak kekuasaan hanyalah Allah SWT dan hanya Dia pula yang menjalankan kekuasaan-Nya (3 : 26) dan menentukan aturan atau syari'at (42 : 13). Hal ini memastikan bahwa *al-Hakimiyah* (kedaulatan) yang mutlak hanya milik Allah SWT (3 : 26-27). Allah sebagai pemilik kekuasaan mutlak menghendaki manusia agar mampu berperan sebagai wakil (khalifah)-Nya di bumi. Oleh sebab itu, manusia dapat mengklaim dirinya mempunyai kekuasaan sepanjang digunakan hanya demi memenuhi kehendak-Nya (6 : 165). Maka kedudukan pemerintahan dalam sebuah negara menurut pandangan Islam diselengarakan atas dasar prinsip kedaulatan rakyat untuk merealisasikan kedaulatan Ilahi.

Atas dasar kenyataan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kesamaan asal usul dan memiliki kewajiban yang sama dalam upaya memakmurkan bumi, maka kapasitas tanggung jawabnya sebagai Khalifatullah harus diakui. Sedangkan klaim kekhalifahan tergantung kepada sejauh mana manusia konsisten menjalankan fungsinya sesuai dengan hukum-hukum-Nya. Salah

satu nilai-nilai universal demokrasi adalah bentuk pengakuan kepada manusia dalam tanggung jawabnya itu.

Di sisi lain, semangat demokrasi yang memberikan peluang yang bebas untuk berpendapat dan mengekspresikan diri akan menyalurkan dan mensinergikan potensi masyarakat sehingga membentuk kekuatan kebersamaan. Demokrasi adalah prinsip dan sekaligus nilai politik, ekonomi dan hukum yang sangat menentukan tabiat sistem pemerintahan, asas dan sumber kekuasaan, pola manajemen dan cara pengambilan keputusan. Ia adalah sarana operasional untuk memperbaiki pemerintahan dan menyelesaikan krisis pemerintahan dalam situasi tiranik yang melanda kehidupan politik bangsa. Ia merupakan bentuk partisipasi rakyat dalam pemerintahan dan merupakan hak rakyat dalam menentukan urusannya serta pemimpinnya. Masyarakat dapat meminta pertanggungjawaban pemimpinnya dan jaminan komitmen mereka dalam mengeluarkan berbagai keputusan.

Salah satu substansi demokrasi, yaitu bentuk partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan kekuasaan tidak bertentangan dengan nilai-nilai *syura*. *Syura* adalah sistem yang berkaitan dengan bagaimana cara penyelenggaraan pemerintahan dalam sebuah negara. Dalam hal pembuatan undang-undang, manusia dalam kapasitas dan posisinya sebagai Khalifatullah, harus sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan Allah. Ketentuan Allah juga mengharuskan penguasa menganut asas musyawarah dalam penyelenggaraan kekuasaannya. Bahkan dalam al-Qur'an prinsip *syura* dijadikan sebagai karakteristik orang yang beriman (42 : 38).

Lembaga legislatif (DPR), sebagai lembaga musyawarah, menjadi sangat penting kehadirannya untuk menegakkan sistem yang demokratis di mana lembaga musyawarah itu dijadikan sebagai sendi pokok sistem pemerintahan (3 : 159; 42 : 39). Penegesan Al-Qur'an tentang pentingnya syura dalam ayat tersebut mempunyai arti bahwa segenap warga berhak ikut terlibat dalam pengukuhan suatu kebijakan yang menyangkut kepentingan umum.

Perlu ditekankan di sini, al-Qur'an dan al-Sunnah adalah sumber nilai-nilai yang mengendalikan syura dalam semua ma-

syarakat dan dalam negara serta institusi-institusinya. Syura adalah badan yang menetapkan, bukan sekedar memberi masukan. Karena itu seluruh ketetapannya mengikat (*mulzimah*) bagi penguasa atau rakyat. Di zaman modern, mekanisme syura tertinggi diatur dalam satu badan yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat.

6. Reformis

Dalam konteks pembangunan sebuah bangsa terdapat dua tipe manusia : manusia perusak (2 : 204-206) dan manusia pembangun yang dalam seluruh kiprahnya hanyalah untuk mencari keridhaan Allah (2 : 207). Pembangunan identik dengan misi otentik manusia di bumi, yaitu *ta'mar* (membangun), bukan *takhrib* (merusak). Islam datang dengan membawa misi penyelamatan manusia dari kehancuran, misi *ishlah* (reformasi) sebagaimana dinyatakan Allah SWT dalam al-Qur'an:

"Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shalih. Shalih berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Ilah selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertaubatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Rabbku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)" (QS. Hud : 61)

Partai Keadilan menyadari bahwa tugas pembangunan adalah salah satu misinya yang paling utama. Ia akan tetap menempatkan posisinya sebagai reformis serta konsisten menjauhi segala bentuk karakter dan sifat-sifat yang menimbulkan kerusakan. Karena itu, segala bentuk tiranik yang telah terbukti menjadi sumber kerusakan di dunia harus dihapuskan. Rasulullah SAW melukiskan para pemimpin tiranik sebagai *"Jabbarun 'Anid"* yang akhir nasibnya telah disiapkan di satu tempat spesial yang khusus diperuntukkan mereka di neraka Jahannam. Kelak mereka akan menjadi penghuni tetap ruang khusus di neraka yang disebut *habhab* yang terkenal kedahsyatannya itu. Rasul SAW bersabda:

"Sesungguhnya di dalam neraka Jahannam itu ada sebuah lembah. Dalam lembah itu ada sebuah sumur yang disebut Habhab. Adalah hak Allah menempatkan para "Jabbarun 'Anid" (diktator sejati) di dalam sumur itu." (HR Thabrani)

Dalam kaitan reformasi ini Partai Keadilan, seperti dinyatakan Al-Mawardi (*Adabu al-Dunya wa al-Dien*), menekankan dua hal penting. *Pertama,* yang berkaitan dengan sistem yang mengatur urusan umum. *Kedua,* yang berkaitan dengan sesuatu yang dapat mewujudkan keshalihan setiap warga.

Apa yang ditekankan Al-Mawardi itu jelas-jelas menyangkut masalah sistem politik yang dapat mewujudkan sebuah tatanan yang baik dan nilai-nilai moral yang dapat membentuk individu-individu yang shalih. Hal itu sekaligus mengisyaratkan bahwa sebuah tatanan politik yang baik dapat melahirkan individu yang shalih.Tesis itu juga menekankan bahwa persoalan politik (*amal siyasi*) sama pentingnya dengan persoalan pembinaan pribadi (*amal tarbawi*). Seorang *hukama*, seperti dikutip Al-Mawardi, mengatakan, "*Adab (rule)* itu ada dua macam: *adab syari'ah* dan *adab siyasah. Adab syari'ah* ialah segala aturan yang berkaitan dengan penerapan kewajiban. Sedangkan *adab siyasah* ialah aturan-aturan yang berkaitan dengan pemakmuran dan perbaikan bumi (*ishlah*). Keduanya harus bermuara pada keadilan. Keselamatan penguasa (*sulthan)* dan kemakmuran negeri tergantung sejauh mana berjalannya keadilan ini. Orang yang meninggalkan kewajiban sama artinya dengan menzalimi diri sendiri. Dan orang yang merusak bumi sama artinya dengan menzhalimi orang lain."

7. Independen

Manusia, sejalan dengan eksistensi dan misi otentiknya, berkewajiban tunduk (Islam) secara total dengan cara melaksanakan kehendak-kehendak Allah (2 : 208). Fungsi fisik dan psikisnya dituntut untuk selalu selaras dengan nilai-nilai dan hukum-hukum-Nya atas dasar kemerdekaan yang dianugerahkan Allah kepadanya. Dengan potensi kemerdekaan itu manusia bebas memilih, dengan sengaja dan sukarela, perjalanan hidupnya (2 : 256) tanpa ada tekanan dan dominasi orang lain dengan resiko ditanggung sendiri (98 : 6-7).

Kesengajaan dan kesukarelaan dalam memilih itulah yang memastikannya menjadi makhluk moral yang harus membebaskan dirinya dari berbagai penindasan dan sifat tiranik yang dapat membelenggu kemerdekaanya. Potensi kemerdekaan dan kebebasan ini pula yang menyebabkan manusia mutlak memerlukan "'tata nilai'" dan "hukum-hukum" yang membentuk pemahaman serta mengatur perilakunya agar perjalanan hidupnya selamat. Nilai-nilai dan hukum-hukum ini harus bersifat komprehensif (*syumuliah*) dan integral (*takamul*), sesuai watak dan kebutuhan manusia itu sendiri, serta menjamin keteraturan dan kesejahteraannya.

Manusia tidak akan pernah dapat menemukan nilai-nilai dan hukum yang komprehensif, integral, sesuai dengan kebutuhan hidupnya, menjamin keteraturan dan kesejahteraan hidupnya kecuali hukum-hukum yang datang dari Yang Menciptakan manusia. Dia Yang Maha Mengetahui apa yang dibutuhkan manusia dan Dia Yang Maha Bijaksana. Karena itu hukum-hukum yang dibutuhkan manusia adalah hukum-hukum yang bersumber dari substansi tauhid dan yang berintikan penolakan terhadap ketidakteraturan (*al-'asywa`iyah*). Hukum-hukum itu ada dalam Risalah-Nya (*Din al-Islam*) yang disebut syari'at. Oleh sebab itu mencari-cari tata nilai dan hukum-hukum yang dapat mengatur hidupnya —meskipun manusia mempunyai potensi ke arah itu karena diberi kemerdekaan memilih— yang tidak sejalan dengan Risalah-Nya, tepatnya tidak bersumber dari Pencipta, adalah tindakan bodoh dan sia-sia (5 : 85).

Manusia sebagai makhluk merdeka menurut hukum penciptaan dan tabiat kelahirannya memiliki hak kemerdekaan dan kebebasan. Islam datang dengan mengikrarkan kemerdekaan beri'tikad, kemerdekaan berpikir, kemerdekaan berbicara, dan kebebasan mengemukakan pendapat, jenis-jenis kemerdekaan yang terus-menerus menjadi dambaan umat manusia.Prinsip kemerdekaan ini datang dari langit untuk mengangkat derajat kemanusiaan. Umar bin Khattab pernah mengucapkan kata-kata yang sangat masyhur, *"Sejak kapan kamu memperbudak manusia, padahal mereka dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan merdeka?"* Ali bin Abi Thalib dalam sebuah pesannya mengatakan, *"Janganlah kalian menjadi budak orang lain; karena sesungguhnya Allah telah menjadikan kalian sebagai orang-orang yang merdeka."*

Pada hakikatnya, sasaran dakwah Islam adalah terciptanya kebebasan dalam memilih ini. Kata-kata Rib'i bin Amir yang diucapkan di hadapan panglima Rustum benar-benar mencerminkan missi dakwah Islam mewujudkan kebebasan dalam arti yang sebenarnya, "Aku datang diutus untuk membebaskan manusia dari penghambaan sesama manusia menuju penghambaan kepada Allah semata, dari kesempitan dunia menuju keluasan dunia akhirat dan dari tirani agama-agama menuju keadilan Islam." Sehingga orang menjadi benar-benar bebas dalam pilihannya, apakah memilih Islam atau tetap dalam kekafirannya?

Dalam masyarakat Madinah, yang telah dibangun Rasulullah SAW, kebebasan tidak dipandang sekedar slogan atau ide. Karena itu Rasulullah SAW menuangkannya dalam diktum-diktum konstitusi yang terkenal dengan Piagam Madinah dan diwujudkan secara nyata bagi segenap penduduk Madinah dengan tidak memandang perbedaan etnis, ras, suku, status sosial, dan agama. Kebebasan yang dituangkan dalam konstitusi itu dikembangkan dan dijamin pelaksanaannya guna terciptanya keutuhan masyarakat Madinah yang pluralistik. Kebebasan itu meliputi kebebasan beragama (pasal 25-35), kebebasan melakukan adat kebiasaan yang baik (pasal 2-10), kebebasan dari kekurangan (pasal 12), kebebasan dari penganiayaan (pasal 16 dan 36), kebebasan dari rasa takut (pasal 47), dan kebebasan berpendapat (pasal 37 dan 23).

Partai Keadilan yang telah menyatakan jati dirinya sebagai partai dakwah akan tetap berada pada posisi kemerdekaan (independensi). Ia adalah sebuah partai yang independen dalam pengertiannya yang benar.

F. PRINSIP DASAR

Dalam rangka mencapai tujuan normatif itu dan memenuhi tuntutan atas realitas yang melingkupi bangsa Indonesia di tengah-tengah percaturan global, maka Partai Keadilan perlu memiliki dasar dan pijakan yang kokoh dalam setiap gerak dan langkah politiknya, selain agenda yang jelas dalam mencapai

tujuan-tujuan yang digariskan. Dasar dan titik tolak ini selain memuat cita-cita normatif, sekaligus juga merupakan kristalisasi keyakinan atas realitas historis dan harapan masa depan bagi Bangsa Indonesia di tengah perjuangan untuk memakmurkan dirinya dan turut serta sekuat tenaga dalam perjuangan memakmurkan bumi. Dasar dan titik tolak itu adalah:

1. Keadilan, Persamaan dan Keseimbangan

Salah satu prinsip yang telah menjadi doktrin politik Islam ialah pandangan yang menegaskan tentang kesatuan manusia. Islam memandang bahwa manusia diciptakan dari asal yang satu (49 : 13; 4 : 1) dan kesamaan posisi sebagai makhluk Allah.

Selain itu, sebagai makhluk berbudaya manusia merupakan kesatuan jasad dan ruh yang dapat menimbulkan daya tarik-menarik di dalam dirinya. Potensi itu harus dibina sedemikian rupa sehingga menjadi satu kekuatan yang penuh keseimbangan. Sebab, masing-masing ekstrem dari daya tarik-menarik itu merupakan aspek hakiki yang harus diberi fungsi yang integral sehingga manusia benar-benar merupakan ruh yang mengejewantah dalam wujud materi.

Pada hakikatnya taqwa merupakan upaya manusia yang terus-menerus dalam mewujudkan keseimbangan itu, bukan hanya pada dirinya tetapi juga pada lingkungan dan peradabannya. Karena itu taqwa tidak lain hanyalah mematuhi hukum-hukum Allah dan sunnah Rasul-Nya serta dalam tata alamiah yang dapat menjamin lahirnya keseimbangan. Dalam kaitan ini taqwa perlu diwujudkan dalam peringkat individu dan dalam peringkat masyarakat.

Atas dasar kenyataan itu, Islam menentukan perlakuan terhadap manusia dan pengakuan terhadap keberadaan serta hak-hak politik dan sosialnya berlandaskan pada keadilan dan persamaan. Partai Keadilan akan berusaha keras menegakkan keadilan dan keseimbangan ini terutama dalam kepemimpinan. Sebab, pemimpin yang zhalim tidak patut ditaati atau diikuti karena kezhaliman yang dilakukannya memupus fungsi kepemimpinannya. Konsekuensi penekanan pada keadilan dalam pemerintahan

yang sah adalah diakuinya hak dan kewajiban bagi setiap individu untuk menuntut keadilan dari pemegang kekuasaan politik.

Di atas prinsip ini manusia sama kedudukannya di hadapan hukum dan undang-undang. Mengingat keadilan adalah dasar dari masalah persamaan dan demokrasi baik di hadapan hukum, ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan, maka ia harus ditegakkan dalam seluruh tingkat kehidupan : pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara. Keadilan harus ditegakkan kepada pihak lain meski berbeda suku, warna kulit, maupun agama. Keadilan yang tegak adalah tolok ukur keberhasilan manusia dalam melaksanakan peran kekhalifahannya di bumi dan ini semua adalah tugas utama setiap manusia. Di sisi lain, disebabkan *istikhlaf al-insan*, dengan segala konsekuensinya, berlaku bagi seluruh manusia, tidak terbatas hanya pada kaum lelaki, maka konsekuensi-konsekuensi logis dari perilaku amaliahnya sebagai khalifah Allah di bumi (manusia) dapat diperoleh sama antara laki-laki dan wanita sesuai dengan fithrahnya (3 : 195; 16 : 97; 9 : 71).

Dengan demikian, pengangkatan manusia sebagai khalifah Allah di bumi merupakan dasar pandangan integralitas wanita dan laki-laki dalam menjalankan amanah ibadah dan amanah risalah. Karena itu wanita memiliki peran politik seperti halnya laki-laki. Hal ini secara faktual terumuskan dalam aktivitas *amar ma'ruf nahi munkar* yang tidak hanya terbatas pada laki-laki (9: 71). Kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar* berlaku sama antara laki-laki dan wanita. Dalam sebuah hadits kewajiban ini dinyatakan berlaku umum.

Pengertian itu jelas menunjukkan kenyataan "kemitraan" antara laki-laki dan wanita dalam peran sosial-politiknya di bumi. Sebab, setiap seruan Allah yang menetapkan syari'at juga meliputi wanita, kecuali jika ada dalil tertentu yang mengkhususkan bagi wanita. Jika Allah berfirman, "Wahai manusia," atau "wahai orang-orang yang beriman," maka wanita juga termasuk di dalam seruan itu. Rasulullah SAW bersabda, "Wanita itu adalah saudara kandung laki-laki". (HR Imam Ahmad, Tirmidzi, Abu Dawud, dan al-Darimi).

2. Kesatuan Nasional

Indonesia dengan segala kekayaan alam, sumberdaya manusia dan realitas historisnya dalam persatuan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke merupakan karunia Allah yang harus disyukuri. Bentuk dari rasa syukur ini adalah mengembangkan kesadaran dan keberdayaan politik rakyat untuk membangun kekokohan struktur negara sambil tetap menjaga integritas dan persatuan nasional. Karena itu segala bentuk tindakan dan setiap fenomena separatisme yang dapat menggoyahkan integritas kesatuan nasional harus ditangani sedini mungkin.

Di sisi lain pluralitas rakyat dan realitas hukum serta kekayaan alamnya merupakan kenyataan yang hidup. Kedua realitas itu dipandang sebagai kenyataan alamiah yang harus dihormati secara proporsional yang menuntut wujudnya kesatuan nasional. Prinsip kesatuan nasional adalah prinsip fundamental dalam membangun sebuah negara yang secara alamiah heterogen. Karena melalui prinsip ini berbagai komunitas dan kelompok yang berbeda dapat dipersatukan dalam bentuk persaudaraan serta rasa kepemilikan dan kebersamaan. Oleh karena itu Partai Keadilan akan tetap konsern menjaga dan mempertahankan integritas negara Indonesia sebagai bagian dari Dunia Islam agar dapat berperan mewujudkan peradaban dunia melalui upaya memelihara persatuan nasional.

3. Kemajuan

Kemajuan adalah cita-cita segenap masyarakat ketika menatap masa depan kehidupan dan perjuangan mereka. Tak ada seorang manusia pun yang ingin surut ke belakang di dalam pentas peradaban. Kemajuan adalah kondisi yang menyatakan pertambahan baik nilai, kualitas maupun daya tarik yang akan memperpendek jarak antara masa kini dengan tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu Partai Keadilan meyakini bahwa kemajuan dalam setiap dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sesuatu yang aksiomatik dan harus diwujudkan.

Agar aktivitas-aktivitas budaya yang melahirkan kemajuan itu selalu bersifat seimbang, manusiawi dan ruhani, maka manusia

harus mewujudkan keseimbangan yang total dalam seluruh aktivitas hidupnya. Untuk mewujudkan keseimbangan ini masing-masing unsur utama manusia harus diberi gizi yang cukup dan imbang pula. Tiga unsur utama manusia yang harus diberi gizi secara imbang ialah jasad, akal, dan ruh. Moral yang dilandasi nilai-nilai *ilahiyah* sangat menentukan keseimbangan tersebut.

Kemajuan dan peradaban merupakan hasil interaksi manusia yang kreatif dengan nilai-nilai dan tantangan eksternalnya. Dalam konteks peradaban Islam berarti interaksi umat dengan nilai-nilai Islam dan tantangan eksternal yang dihadapinya. Peradaban sendiri lahir bila didukung oleh universum kosmis, sarana dan komunitas manusia. Dalam hukum peradaban komunitas manusia yang dapat melahirkan kemajuan dan peradaban adalah yang memiliki martabat. Tinggi rendahnya sebuah peradaban ditentukan oleh tinggi rendahnya martabat suatu bangsa Semakin tinggi martabat suatu bangsa akan semakin tinggi pula nilai peradaban yang dilahirkannya. Sedangkan ketinggian martabat manusia dapat dicapai apabila ia mampu melepaskan diri dari dominasi materi dan hawa nafsunya (7 : 176) serta ditentukan oleh keunggulannya dalam menjalankan misi kehidupannya. Allah SWT menjadikan taqwa sebagai puncak prestasi yang dapat dilakukan manusia sehingga ia memperoleh puncak kemuliaan atau martabat (49 : 13). Taqwa merupakan tangga untuk mencapai hal-hal yang tinggi (84 : 19) dan memastikannya memperoleh kepemihakan Allah SWT (16 : 127-128).

Pembangunan sebuah peradaban memerlukan individu dan masyarakat yang salih, yang layak memikul *amanah khilafah*. Kesalihan individu lahir dari ketaqwaan yang bersifat individu. Sedangkan kesalihan kolektif lahir dari ketaqwaan yang bersifat kolektif. Mereka secara bersama-sama memiliki kesadaran sejarah, kesadaran tentang fakta sosial, dan kesadaran tentang keharusan melakukan perubahan sebagai perwujudan kewajibannya sebagai makhluk moral dalam melaksanakan misi orisinalnya, yaitu membangun peradaban.

Dalam membangun sebuah peradaban "*ruh 'amal wa al-ibda'*" (semangat berkarya dan inovasi) merupakan "*malamih*" (ciri-ciri) asasi. Dalam Islam, kerja-kerja yang baik dan produktif dijadikan

sebagai dasar penilaian (9 : 105). Semangat berkarya ini terlihat pula dalam hadits Rasulullah SAW, *"Seandainya kiamat akan segera datang dan di tangan Anda masih ada satu bibit pohon kurma yang dapat ditanam, maka lakukanlah." (HR Ahmad).*

Semangat berkarya dan berinovasi yang dapat melahirkan kemajuan tersebut menuntut kualitas pelakunya, baik sebagai individu ataupun sebagai sebuah masyarakat Kualitas ini akan melahirkan keunggulan bagi seseorang atau sebuah bangsa. Dalam al-Qur'an diisyaratkan bahwa taqwa melahirkan keunggulan-keunggulan tertentu. Setidak-tidaknya orang yang bertaqwa secara intelektual (8 : 2 dan 2 : 282), moral (65 : 2) dan bahkan ekonomis (65 : 3) memiliki keunggulan. Jelas, ketiga keunggulan tersebut merupakan modal utama dalam pembangunan sebuah kemajuan dan peradaban. Bahkan keunggulan lain orang bertaqwa terlihat pada visinya yang jauh ke depan (59 : 18). Dengan kata lain, seandainya keunggulan-keunggulan tersebut menjadi keunggulan yang bersikap kolektif, maka akan menjadi sebuah masyarakat yang bermartabat, maju dan unggul serta dapat memberikan kontribusi kepada kebaikan umat manusia.

4. Khidmatul Ummah demi Persatuan

Partai Keadilan meyakini bahwa persatuan umat adalah tonggak terpenting bagi kesatuan bangsa. Ia merupakan dambaan segenap kaum muslimin. Kesatuan umat yang besar tersebut memang tak mungkin dibangun hanya dengan mengandalkan keinginan, obsesi dan cita-cita belaka. Namun harus ada proses-proses nyata yang dapat mengantarkan pada pencapaian cita-cita besar itu. Dalam kaitan ini Partai Keadilan berupaya memposisikan dirinya sebagai garda utama khidmatul ummah demi terwujudnya cita-cita besar tersebut.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut Partai Keadilan meyakini bahwa pembinaan pribadi, keluarga, masyarakat dan negara adalah jalan yang harus ditempuh bagi siapapun yang merindukan persatuan. Persatuan umat yang hakiki harus dibangun di atas landasan pemahaman dan pemikiran yang bersumber dari ajaran Islam itu sendiri.

"Dan (Allah-lah) yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman). Walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. Al Anfal : 63).

Partai Keadilan berpendapat bahwa berdirinya kelompok-kelompok, organisasi-organisasi ataupun partai-partai Islam adalah suatu hal yang wajar dan alamiah sebagai konsekuensi tidak adanya kesatuan imamah dalam satu sisi dan tumbuhnya kesadaran pentingnya persatuan umat di sisi lain. Para aktivis yang menyadari pentingnya sebuah persatuan umat itu dan kemudian berupaya menghimpun manusia di sekelilingnya untuk mewujudkan cita-cita yang luhur tersebut adalah sebuah tindakan yang terhormat. Maka fenomena banyaknya kelompok, organisasi atau partai adalah sebuah fenomena proses yang tumbuh secara positip sebagai akibat dari kehancuran umat, bukan sebuah fenomena perpecahan yang terjadi dari sebuah kesatuan yang utuh.

Oleh karena itu, langkah-langkah *ta'aruf* (saling mengenal), *tafahum* (saling memahami), *ta'awun* (saling menolong), dan *takaful* (saling menanggung) harus digalakkan di antara kelompok, organisasi atau partai tersebut guna melahirkan titik-titik persatuan yang lebih besar. Proses ini adalah sesuatu yang bukan mustahil untuk dilakukan, asalkan soliditas di dalam kelompok, organisasi atau partai itu sendiri sangat kokoh baik dalam pemikiran, metode maupun tujuannya. Namun demikian mengharapkan suatu kondisi yang sama sekali meniadakan perbedaan pendapat adalah hayalan belaka, karena bertentangan dengan karakteristik kemanusiaan dan bukti-bukti sejarah Islam sendiri. Oleh karenanya dalam upaya mengokohkan langkah-langkah kesatuan umat Partai Keadilan sangat menghargai pendapat Al Ustadz Dr. Yusuf Qardlawi bahwa: Partai itu adalah mazhab di dalam politik, sedangkan mazhab itu adalah partai di dalam fiqih. Yang penting, dalam menghadapi realitas tersebut, masing-masing aktivis memiliki kelapangan dada (*insyirahu al-shadr*) sebagaimana doa Nabi Musa ketika beliau harus melakukan perhitungan dengan Fir'aun, sang diktator yang mengidentikkan

dirinya sebagai tuhan.

5. Kerjasama Internasional

Ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan manusia membuat dunia tampak mengecil seperti sebuah dusun di tengah alam raya. Kemajuan dalam dunia informasi seakan menghilangkan batas-batas sebuah negara. Manusia yang satu dengan lainnya, masyarakat yang satu dengan lainnya, bahkan bangsa yang satu dengan lainnya terikat pada hubungan saling ketergantungan. Sebuah bangsa tidak dapat mandiri, terpencil dan terisolasi dari bangsa lain. Interaksi antar bangsa baik tingkat regional maupun internasional tidak dapat dihindarkan. Bangsa Indonesia memerlukan bangsa lain dan demikian pula sebaliknya. Mereka saling memberi dan menerima dalam kerangka pemakmuran bumi.

Dengan demikian Partai Keadilan merasa perlu untuk berusaha sekuat tenaga mendorong upaya tersebut dalam rangka menandaskan kepada dunia internasional bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, mengakui hak bangsa-bangsa dalam kehidupan bersama yang saling menghormati, saling bekerjasama untuk meningkatkan kemajuan, pertumbuhan dan pemakmuran bumi yang dilandasi rasa keadilan. Tegasnya, Partai Keadilan menginginkan terciptanya sebuah tata dunia yang saling menghormati sesama sehingga misi *rahmatan lil 'alamin* dapat diwujudkan secara konkret dalam tata hubungan internasional.

G. VISI DAN MISI

Dalam konsep politik Islam ada semacam penekanan pada fungsi kepercayaan. Para pegawai negara, sebagai "wakil Allah" yang ditunjuk untuk memerintah rakyat, sekaligus orang-orang kepercayaan (*wukala*) rakyat itu sendiri. Mereka berkewajiban melindungi kepentingan rakyat atau warga yang telah memberikan kepercayaan. Kepercayaan ini sedikit pun tidak boleh disia-siakan. Ketidakmampuan para pegawai negara dalam menjaga kepercayaan itu menyebabkan gugurnya kelaikan mereka dalam mengemban amanah (kepercayaan). Di sini terlihat dengan jelas tentang pentingnya peran sosial dan individu seluruh warga dalam sebuah negara. Hadits paling masyhur tentang sisi penting tanggung jawab sosial dan individu adalah sabda Nabi yang berbunyi, *"Semua orang di kalangan kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu semua akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinanmu. Pemimpin semua orang akan dituntut pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Seorang isteri adalah ratu rumah tangga yang akan dimintai pertanggungjawaban atas wilayah kepemimpinannya. Seorang anak adalah pemimpin bagi uang yang diberikan ayahnya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Demikian pula, seorang pelayan adalah pemimpin bagi kekayaan tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Sungguh, kamu semua adalah pemimpin dan akan dituntut tanggung jawab kepemimpinanmu terhadap rakyat yang memberikan kepercayaan kepadamu" (HR Muslim).*

Hadits tersebut merupakan dasar berbagai pengakuan individu terhadap negara. Pengakuan itu bukan hukum alam, bukan hak natural, dan bukan hukum positif, melainkan hukum syari'at yang mengharuskan pada para pegawai negeri untuk melihat diri sendiri sebagai orang kepercayaan dan agen yang dipercayai Allah untuk memimpin masyarakat. Kendati individu dipandang sebagai ahli waris dalam kepercayaan itu, namun tidak pernah diletakkan sebagai suatu kesatuan yang independen. Ia senantiasa dipandang sebagai anggota masyarakat (*ummah*) dan dengan kewajiban keanggotaannya dalam masyarakat Ia berhak mengenyam berbagai manfaat pemerintahan.

Sejalan dengan prinsip kepercayaan itu, pemerintahan bertanggung jawab kepada Allah dan masyarakat dengan segenap anggotanya. Pertanggungjawaban ini dikemukakan secara individual sehubungan dengan pelaksanaan nilai-nilai moral keadilan, persamaan, dan kebebasan dalam posisinya sebagai agen yang ditunjuk Allah dalam menata dan memelihara segala karunia-Nya. Masyarakat yang secara sosial dan individu berdaya dalam berperan menentukan kebijakan umum dalam sebuah negara disebut masyarakat madani. Oleh sebab itu, pada intinya, ma-

syarakat madani adalah masyarakat yang tidak terlalu tergantung pada peran penguasa negara dalam penentuan kebijakan-kebijakan umum. Ia adalah masyarakat yang memiliki kesadaran kolektif dalam menentukan kebijakan yang menyangkut kepentingan umum.

Manifestasi semua kesadaran itu mengakumulasi dalam kesadaran sebagai makhluk moral. Dalam konteks Islam kesadaran ini terkait dengan kesadaran kewajiban beramar ma'ruf nahi munkar. Tentu saja, kewajiban beramar ma'ruf dan nahi munkar dalam konteks kesadaran politik bagi rakyat di sebuah negara tidak lepas dari rentetan kontrol yang semestinya dilakukan oleh rakyat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan penguasa.

Kesadaran tersebut dapat membentuk sebuah masyarakat yang sadar tentang perlunya keterlibatan masyarakat dalam setiap keputusan yang menyangkut kepentingan bersama dan *musyarakah (sharing)* terhadap kebijakan-kebijakan yang menyangkut kepentingan umum. Konsekuensinya dalam masyarakat madani harus dikembangkan asas *musyawarah* dalam arti yang sebenarnya. Islam mempunyai gambaran tersendiri tentang keterlibatan dalam berbagai persoalan, termasuk persoalan politik. Gambaran itu wujud dalam batas ekuivalensi dengan *amar ma'ruf nahi munkar*. Kaum muslimin diarahkan dan dididik bahwa setiap Muslim harus memiliki sikap dan pendapat terhadap apa yang ada di sekitarnya. Dua hadits yang dikutip berikut cukup memberikan gambaran otentik tentang perlunya setiap warga turut memberikan *sharing* dalam persoalan-persoalan umum umat. Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa di antara kalian yang melihat kemunkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya, jika tidak mampu, maka hendaklah ia mengubahnya dengan lisannya, dan jika tidak mampu juga, maka hendaklah ia mengubahnya dengan hatinya, yang demikian itu merupakan selemah-lemah iman. (Al-Hadits)." Sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa orang-orang atas dosa yang diperbuat orang banyak, sehingga mereka melihat kemunkaran di hadapan mereka sedangkan mereka mampu mencegahnya tetapi mereka tidak mencegahnya". (HR Ahmad)*

Tetapi tanpa keberdayaan warga nyaris mustahil rentetan kontrol itu dapat terlaksana. Karena itu, keberdayaan masyarakat dalam seluruh hak-hak dan kewajibannya merupakan hakikat masyarakat madani (*civil society*) yang keberadaannya antara lain bertujuan mencegah kesewenang-wenangan kekuasaan elit yang mendominasi kekuasaan negara. Oleh sebab itu, Partai Keadilan dalam rencana-rencana aksinya menekankan pemberdayaan masyarakat baik secara psikologis, sosiologis, ekonomis dan politis.

Masyarakat madani adalah sebuah model yang dicita-citakan oleh Partai Keadilan bagi masyarakat Indonesia masa depan sebagai prasyarat pencapaian model kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana yang disebut dalam Al Qur'an sebagai *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*. Partai Keadilan akan ikut berkontribusi dalam peraihan cita-cita tersebut bersama partai-partai maupun unsur-unsur masyarakat lain yang memiliki kesamaan cita-cita.

Dalam posisi ini Partai Keadilan memiliki visi kepartaian yang mencerminkan keinginan untuk eksis dengan:

1. Menjadi unsur perekat dan pengarah kesatuan umat dan bangsa.
2. Menjadi wadah pendidikan politik bagi umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia umumnya sekaligus tangga menuju kepemimpinan nasional.
3. Menjadi pelopor pengembangan kultur pelayanan dalam tradisi politik Indonesia.
4. Menjadi dinamisator pembelajaran bagi bangsa Indonesia.
5. Menjadi akselerator bagi wujudnya masyarakat madani di Indonesia.

Sedangkan misi yang dicanangkan guna pencapaian visi tersebut adalah:

1. Berjuang mewujudkan masyarakat madani di Indonesia.
2. Menegakkan eksistensi politik umat Islam di Indonesia.
3. Berjuang untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
4. Mengembangkan tradisi profesionalisme pengelolaan dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

5. Ikut memberi kontribusi positip bagi pengembangan dan kemajuan peradaban dunia.

❖❖❖

Anggaran Dasar Partai Keadilan

MUQADDIMAH

Bangsa Indonesia sepenuhnya menyadari, dalam perjalanan sejarahnya tidak pernah berputus asa mewujudkan kemerdekaan dan keadilan yang sejati. Sebab, kemerdekaan yang hakiki dan keadilan yang merata merupakan hak asasi manusia yang paling fundamental. Tanpa kemerdekaan dan keadilan kehidupan manusia tidak akan sejahtera, mengingat dengan kemerdekaan Allah Subhanahu Wata'ala memuliakan manusia dan dengan keadilan kehidupan menjadi tenteram.

Di atas prinsip-prinsip itulah masyarakat bangkit untuk memperjuangkan kemajuan dan pembaharuan, serta bekerja keras

ketentuan yang disebutkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini maka diatur dalam ketentuan khusus yang ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan Partai.

Pasal 63 : Musyawarah Nasional Pertama

Musyawarah Nasional I (pertama) terdiri dari Dewan Pendiri, Dewan Pimpinan Pusat, Majelis Syuro, dan Dewan Syari'ah serta anggota terpilih dengan perwakilan yang proporsional untuk keanggotaan partai di unit kepengurusan Wilayah sesuai dengan peraturan khusus yang diterbitkan oleh Panitia Persiapan Musyawarah Nasional. Kompetensi dan jurisdiksi Musyawarah Nasional yang termuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini dipraktekkan.

❖❖❖

Agenda Nasional Partai Keadilan

A. UMUM

- Membangun watak bangsa (*character building*) sebagai modal dasar utama pembangunan nasional melalui kegiatan dakwah amar ma'ruf nahi munkar guna mengkokohkan kepribadian para anak bangsa dengan menggali dan menghayati kembali nilai-nilai relegius yang telah lama bersemayam di kedalaman hati mereka.
- Menempatkan ulama, cendekiawan dan aparat pemerintahan dalam sebuah sistem negara kesatuan yang kokoh, sehingga terjalin sebuah kerja bersama dalam membangun kehidupan bangsa.
- Mewujudkan konsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan melalui akurasi perencanaan, pengokohan perundangan-undangan dan kelembagaan pengawas–

an pembangunan yang independen.

- Mewujudkan keterpaduan strategi pembangunan pada seluruh bidang sehingga menghasilkan kesatuan program dalam pelaksanaan pembangunan. Menjadikan bidang tertentu sebagai panglima dan simbol kesuksesan mengakibatkan pembangunan pada masa lalu dipenuhi ketimpangan dan pembiasan.
- Reorientasi terhadap struktur dan pentahapan pembangunan Indonesia masa depan dalam upaya membangkitkan kembali potensi bangsa di atas puing kehancuran ekonomi, politik dan sosial Orde Baru.

B. EKONOMI

- Mengembangkan sistem ekonomi moral yang berlandaskan pada nilai-nilai transendental sebagai dasar pertimbangan etik, konsepsional dan operasional dalam seluruh kegiatan ekonomi yang berkeadilan.
- Mengokohkan kebijakan afirmasi dalam ekonomi yang berkeadilan serta berpihak kepada rakyat "kecil" tanpa membeda-bedakan ras, suku dan agama agar tercapai persamaan dalam mendapatkan peluang-peluang ekonomi bagi seluruh pihak.
- Mengembangkan dan memperkokoh sistem keuangan bagi hasil sehingga mampu menjadi alternatip bagi sistem ekonomi yang sudah berlangsung.
- Memberdayakan UKM dan koperasi melalui penghapusan segala hambatan usaha dan mendorong faktor-faktor dinamis yang dimilikinya. Perlakuan diskriminatif yang mengutamakan usaha besar dengan berbagai proteksi, fasilitas khusus dan berbagai kebijakan distorsif harus dihilangkan.
- Menurunkan pengangguran dan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja.
- Menegakkan hak-hak buruh dan menempatkannya sebagai aset nasional dan mitra pengusaha.
- Menggairahkan sektor pertanian melalui pemberdayaan petani dan penciptaan iklim usaha yang kondusif dalam rangka mencapai swasembada pangan.

- Meningkatkan selektivitas pemberian subsidi dalam penyediaan pelayanan sosial dengan menjauhkannya dari praktek korupsi dan kolusi.
- Menyeimbangkan antara sektor riel dengan sektor moneter sehingga pertumbuhan ekonomi tidak menjadi semu, tetapi berjalan secara mantap.
- Mengembangkan dan memperkokoh sektor agribisnis dan agroindustri sebagai andalan bagi pembangunan ekonomi.
- Mewujudkan pertumbuhan yang dinamis dengan ditopang oleh kepercayaan nasional maupun internasional sehingga modal dan investasi asing dapat masuk secara langsung kepada lembaga-lembaga usaha.
- Memaksimalkan otonomi daerah melalui peningkatan partisipasi perencanaan dan pelaksanaan aktivitas pembangunan sehingga mampu meningkatkan efektivitas peran pemerintahan daerah.
- Mengokohkan peran negara dalam pembangunan ekonomi melalui dukungan kepercayaan rakyat dan internasional yang dimunculkan dari pemerintahan yang efisien, bersih dan transparan.
- Meningkatkan tarap hidup masyarakat dengan kebijakan makro yang berorientasi kepada nilai-nilai keadilan.

C. POLITIK

- Menegakkan keadilan di seluruh tingkatan kehidupan: pribadi, keluarga, masyarakat, aparat keamanan, tokoh masyarakat, serta negara, dan menjadikannya sebagai dasar demokrasi dalam bidang hukum, ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan.
- Memperkuat pilar-pilar kesatuan nasional dengan mengeleminir setiap gerakan yang dapat menumbuhkan separatisme dan membangun kesadaran bahwa kesatuan nasional adalah sumber stabilitas dan keamanan bangsa. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mengoptimalkan sarana media massa, budaya dan pendidikan.
- Membangun rasa tanggung jawab rakyat untuk mengontrol dan mengevaluasi kinerja para pemimpinnya sebagai salah

satu perwujudan masyarakat madani.

- Mengembangkan iklim transparansi dalam penyelenggaraan negara dan pengambilan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak.
- Mewujudkan fungsi-fungsi kelembagaan negara dengan meningkatkan kemandirian lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif melalui penerapan perundang-undangan dan penempatan aparat-aparat yang bersih.
- Membangun proses demokratisasi politik yang bersih dengan penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia tanpa diwarnai berbagai bentuk intimidasi baik dari pihak pemerintah, aparat keamanan ataupun partai-partai politik peserta pemilu itu sendiri.
- Kesatuan nasional menuntut ABRI yang kuat, oleh karena itu profesionalisme ABRI perlu ditegakkan.

D. HUKUM

- Menegakkan supremasi hukum dalam segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Mengarahkan keberpihakan hukum dan praktek hukum pada yang lemah, sehingga dirasakan adanya rasa keadilan dan menghindarkannya dari jebakan orientasi sesaat baik atas nama stabilitas politik maupun pertumbuhan ekonomi.
- Mengakhiri keraguan-raguan dalam pemilihan kepribadian hukum Indonesia. Upaya untuk memaksakan hukum-hukum Barat telah menyebabkan hukum terlepas dari akar filosofis, sosiologis dan historis masyarakatnya.
- Melalui penegasan visi hukum Indonesia, perlu dilakukan deregulasi struktur - birokrasi hukum yang mampu menghilangkan ambivalensi departemental maupun kurikulum pendidikan.

E. PENDIDIKAN

- Melakukan re-orientasi pendidikan nasional menuju sistem pendidikan terpadu, dan memperluas penyelenggaraan wajib belajar pendidikan melalui peningkatan status hukum, mobilisasi fasilitas fisik dan sukarelawan pendidikan, serta meningkatkan motivasi pendidikan di kalangan masyarakat.
- Meningkatkan tindakan afirmasi yang menyangkut profesionalitas, integritas dan penghargaan dalam rangka mengembalikan peran guru sebagai anasir kunci dalam pendidikan dan pembangunan bangsa.
- Meningkatkan alokasi anggaran pendidikan hingga mencapai taraf yang seimbang dengan kebutuhan pemecahan problema sumberdaya manusia dalam pembangunan Indonesia masa depan.
- Mewujudkan wibawa pendidikan nasional melalui evaluasi berkesinambungan terhadap aspek konsepsional dan operasional sistem pendidikan nasional dalam berbagai jenis, jalur dan jenjang dalam rangka menggali potensi bangsa dan menghadapi tantangan-tantangan masa depan yang makin mengglobal.
- Mengokohkan peran pendidikan nasional sebagai sarana pembentukan kepribadian bangsa Indonesia yang sangat mengutamakan nilai-nilai keagamaan dalam segenap aspek kehidupannya. Upaya ini mencerminkan kesungguhan menempatkan pendidikan sebagai tulang punggung pencapaian masa depan Indonesia yang beradab.

F. ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

- Mengokohkan peran iptek dan sumberdaya manusia sebagai inti bagi pengembangan ekonomi nasional yang berbasiskan sektor riil.
- Mengintegrasikan secara holistik upaya pengembangan iptek dalam proses industrialisasi baik dalam industri besar, menengah maupun kecil.
- Mengarahkan penguasaan dan pendalaman iptek serta pembangunan tekno-struktur (*humanware, orgaware, technoware* dan *infoware*) nasional kepada bidang-bidang yang dianggap strategis (memiliki dampak ekonomi yang tinggi) dalam industri nasional baik jangka pendek maupun panjang.

- Melenyapkan upaya untuk menjadikan iptek sebagai pajangan supremasi nasional yang membebani anggaran negara sehingga cenderung mengabaikan sisi rasionalitas dan azas manfaat.
- Menghidupkan upaya-upaya pemberian bingkai moral dalam pengembangan dan aplikasi iptek, sehingga iptek menjadi rahmat bagi manusia.
- Mendorong upaya-upaya pengembangan budaya iptek dalam rangka menumbuhkan apresiasi masyarakat terhadap iptek.

G. LINGKUNGAN HIDUP

- Mengokohkan upaya Pembangunan berkelanjutan sebagai manifestasi kearifan dan keadilan manusia terhadap lingkungan hidup mereka. Pembangunan harus dilaksanakan dengan menjaga keseimbangan ekologi serta kelestarian sumberdaya alam sehingga pemenuhan hak-hak kesejahteraan manusia yang hidup di hari ini tidak dilakukan dengan merampas hak-hak generasi mendatang.
- Bersama masyarakat mendorong upaya-upaya yang berkaitan dengan pencegahan pencemaran dan konservasi lingkungan serta melindungi keragaman hayati baik flora maupun fauna dari pencurian dan pemusnahan oleh semua pihak yang tidak bertanggung jawab.

H. PEMERINTAHAN DAERAH

- Mengokohkan usaha-usaha perbaikan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah menuju sistem manajemen nasional yang terdesentralisasi dengan tetap menjaga pilar-pilar kesatuan nasional.
- Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa khususnya dalam kaitan dengan pelayanan masyarakat di daerah-daerah di seluruh Indonesia.
- Menjamin keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan negara sehingga tidak dianak-tirikan mereka yang bekerja keras bagi kemakmuran negara dengan keahlian dan kemampuan yang dimilikinya.
- Merealisasikan redistribusi kekayaan alam dan kemampuan yang dimilikinya secara proporsional dan transparan dengan mempertimbangkan aspek kondisi lokal dan kesatuan nasional.
- Memberlakukan undang-undang lingkungan hidup untuk memelihara aset daerah dari eksploitasi alam yang merugikan bangsa Indonesia secara keseluruhan.
- Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia secara berimbang di daerah-daerah melalui kesempatan pendidikan.

I. KEPEMUDAAN

- Mewujudkan keberdayaan dan kemandirian pemuda dengan mengoptimalisasi potensi, kebijakan dan budget yang mendukung serta pengarahan pendidikan yang selaras.
- Memunculkan kepeloporan pemuda sehingga tumbuh sikap pro aktif dan partisipatif dalam persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat dan bangsa serta memiliki keberpihakan pada kebenaran dan keadilan.
- Membuka kesempatan bagi kemunculan kepemimpinan nasional dari kalangan pemuda yang berada pada puncak inovasi dan kreativitasnya.

J. SENI BUDAYA

- Menumbuhkan profesionalisme seniman dan budayawan yang mengandung nilai-nilai luhur, sehingga mampu menghasilkan karya seni yang bernilai luhur dan memiliki keunggulan di tingkat internasional melalui program pendidikan, pelatihan dan penyediaan sarana pendukung.
- Mengoptimalkan lembaga-lembaga yang berfungsi sebagai pengontrol terhadap karya seni budaya sehingga karya tersebut dapat berfungsi sebagai media pencerminan dan pembentukan kepribadian bangsa.
- Menyeleksi masuknya berbagai karya seni budaya asing

sehingga bangsa terhindar dari misi-misi destruktif yang dapat menghancurkan masa depan bangsa.

K. PENERANGAN

- Mengokohkan kebebasan pers yang bertanggung jawab terhadap nilai-nilai kebenaran, keadilan, kesatuan nasional, kepribadian serta masa depan bangsa.
- Menumbuhkan sensitivitas kalangan pers untuk melakukan pemilihan terhadap materi yang dipublikasikan.
- Menumbuhkan peristiwa dan berita secara obyektif dan bertanggung jawab.
- Menjauhkan sikap media massa berbentuk aliran (subjektif) yang dapat menyebabkan kesalahan informasi.

L. KEWANITAAN

- Menempatkan pemberdayaan wanita Indonesia ke dalam konteks perwujudan masyarakat madani melalui pengguliran model-model keluarga madani, yaitu keluarga yang mandiri, bahagia, sejahtera, dan berkepedulian sosial.
- Memposisikan peran wanita sebagai subyek pembangunan dalam suatu wacana keadilan baru yang bertata nilai sesuai dengan mendorong setiap usaha meningkatkan peran-peran wanita dalam pendidikan, memperluas jaminan kesehatan bagi ibu dan anak, pemberdayaan ekonomi keluarga serta pengayoman hukum.
- Mengokohkan peran penting wanita dalam menentukan kualitas moral bangsa dalam kaitan pendidikan generasi baru dan pengembangan kepribadian kewanitaan.

M. KESEHATAN

- Mengupayakan agar aspek kebijakan dan strategi kesehatan senantiasa harus ditujukan bagi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat luas dengan tetap mempertimbangkan

aspek kualitas, pemeratan, efisiensi, dan kesinambungan.
- Mengupayakan desentralisasi kebijakan operasional administratif dan manajemen. Hal tersebut diperlukan untuk meningkatkan fungsi kelembagaan yang proaktif terhadap permasalahan kesehatan, memiliki otoritas, serta mengutamakan konsolidasi dan koordinasi dengan lembaga-lembaga lainnya.
- Mengupayakan terwujudnya perubahan paradigma orientasi pemeliharaan kesehatan dari kuratif ke arah promotif dan preventif bagi seluruh lapisan masyarakat.
- Mengupayakan agar program peningkatan derajat kesehatan dan pelayanan kesehatan tidak lagi berorientasi pada kepentingan pemerintah dan provider saja, tetapi harus berorientasi pada hak dan kepentingan masyarakat dengan meningkatkan peran serta aktif masyarakat, serta kemandirian upaya pelayanan kesehatan masyarakat.
- Mengupayakan agar pembinaan sumberdaya menusia selalu diarahkan pada:
  a. Upaya merekrut dan mencetak tenaga kesehatan yang berkualitas.
  b. Peningkatan profesionalisme dan mentalitas.
  c. Pemerataan penyebaran sesuai dengan kondisi obyektif kebutuhan di lapangan.
- Mengupayakan agar perluasan dan peningkatan kualitas industri kesehatan diorientasikan ke hulu untuk menciptakan bahan baku dan alat kesehatan, dengan mengutamakan pada kemandirian, pengawasan, efisiensi, sesuai dengan keperluan dalam bidang pembangunan kesehatan.

N. SOSIAL

- Membangun sistem sosial yang terbingkai dalam kerangka nilai-nilai keadilan.
- Membangun sistem sosial yang proaktif dalam menyehatkan dan mensejahterakan dirinya, serta mampu mengantisipasi diri sendiri dari pengaruh negatif hasil-hasil pembangunan dan sebagai sistem kontrol sosial terhadap pemerintah guna mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat.

- Menjadikan masyarakat sebagai aktor sosial utama dalam rangka menumbuhkan tanggung jawab pemerintah.
- Menumbuhkan lembaga-lembaga masyarakat untuk memacu kemandirian dan mewujudkan desentralisasi.

❖❖❖

Seruan Untuk Anggota dan Simpatisan Partai

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah mengokohkan kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan mencabut kekuasaan dari siapa yang dikehendaki-Nya. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sholawat dan salam bagi pemimpin dan teladan kaum muslimin, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa serta memperjuangkan risalah Ilahi hingga kokoh dan tersebar di muka bumi sebagai rahmatan lil 'alamin.

Alhamdulillah, Allah telah memberikan keberkahan kepada kita dalam meniti jalan kebersamaan sehingga tanpa terasa detik demi detik, hari demi hari dan tahun demi tahun telah kita lewati dalam perjuangan menegakkan kalimat-Nya di muka bumi ini. Sebuah perjalanan yang insya Allah akan mengantarkan kita ke